

LAPORAN HASIL PENELITIAN



KAJIAN KOMUNITAS ADAT TERPENCIL KABUPATEN GORONTALO UTARA

Tim Peneliti:

Prof Dr Rauf Hatu M.Si
Ridwan Ibrahim, M.Si
Dewinta Rizky R. Hatu, M.Sos
Sahrain Bumulo, M.Si
Sunandar Macpal M.A
Mohamad Hidayat Mohtar M.H
Halid Lemba M.Sc

KERJASAMA

PUSAT STUDI HUMANIORA DAN PEMBANGUNAN
FAKULTAS ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
dan
BAPPPEDA KABUPATEN GORONTALO UTARA
TAHUN 2022

KATA PENGANTAR

Pujisyukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, karena dengan karunia dan rahmat-Nya kami dapat menyelesaikan Laporan Hasil Penelitian tentang Kajian Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Gorontalo Utara khususnya di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek dan Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola. Laporan hasil kajian Komunitas Adat Terpencil ini diharapkan dapat memberikan gambaran terkait pemetaan sosial ekonomi masyarakat calon penerima bantuan program Komunitas Adat Terpencil di kedua desa yang menjadi fokus kajian.

Sebagai sebuah komunitas yang hidup terpencil dan sulit untuk dijangkau, Komunitas Adat Terpencil memiliki hak yang sama dalam mendapatkan perlakuan yang setara dari pemerintah sebagaimana masyarakat pada umumnya. Komunitas Adat Terpencil perlu untuk mendapatkan perlindungan sosial yang inklusif dalam hal kesejahteraan hidup guna meningkatkan harkat dan martabatnya dengan menjadikannya prioritas pembangunan melalui berbagai program pemberdayaan masyarakat yang digagas oleh pemerintah.

Selesainya penyusunan laporan hasil penelitian ini tidak lepas dari adanya bantuan semua pihak. Terima kasih kami ucapkan terutama kepada pemerintah Desa Ibarat dan Desa Tombulilato karena dengan sudi telah meluangkan waktunya untuk kami wawancarai dan juga telah memberikan izin kepada para peneliti untuk melakukan pengumpulan data di masyarakat. Meski dengan padatnya agenda yang sedang dilaksanakan namun pemerintah desa telah berkenan untuk menerima kami dengan baik di kedua desa yang menjadi fokus kajian ini.

Terima kasih kami ucapkan kepada masyarakat dari kedua desa yang menjadi fokus kajian penelitian ini, dimana banyak informasi yang telah kami gali dari masyarakat dan telah mendapatkan respon yang cukup baik dari semua masyarakat yang kami wawancarai. Di tengah kesibukan masyarakat yang mayoritasnya petani, telah berkenan meluangkan waktunya untuk menghadiri undangan kami ke kantor desa untuk proses wawancara, terutama dalam

membantu menyiapkan segala keperluan terkait informasi primer dan sekunder untuk bahan analisis

Terima kasih juga kami ucapkan kepada pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang telah sudi dan berkenan meluangkan waktu dalam melakukan pendampingan dan memberikan informasi data-data yang diperlukan tim peneliti sejak proses penyusunan proposal, pengumpulan data lapangan, hingga pemaparan hasil penelitian ini. Tanpa bantuan dari pihak pemerintah daerah, maka kami yakin akan mengalami kesulitan selama proses penelitian ini dilakukan.

Akhirnya, kami sangat berharap semoga Laporan hasil kajian ini dapat memberikan kontribusi serta manfaat dalam merumuskan program pembangunan terutama kegiatan pemberdayaan pada masyarakat calon penerima program Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Gorontalo Utara, dan tentunya laporan penelitian ini dapat menjadi bahan analisis dan langkah awal dari upaya pemerintah untuk menentukan arah kebijakan pembangunan di wilayah-wilayah Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Gorontalo Utara.

Gorontalo, September 2022

Tim Peneliti

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	3
C. Tujuan Penelitian	3
BAB II Tinjauan Pustaka	5
A. Kearifan Lokal	5
B. Komunitas Adat Terpencil	7
C. Pemberdayaan Masyarakat	9
D. Partisipasi Masyarakat	11
BAB III METODE PENELITIAN	13
BAB IV HASIL PENELITIAN	19
BAB V PENUTUP	64
A. Simpulan	64
B. Saran	65
DAFTAR PUSTAKA	

DAFTAR TABEL

Tabel 4.1 Luas Wilayah Menurut Kecamatan.....	21
Tabel 4.2 Keadaan Penduduk Menurut Kelompok Umur.....	24
Tabel 4.3 Presntase Keadaan Penduduk Menurut Jenis Kegiatan Utama Tahun 2002 (Dalam %)	27
Tabel 4.4 Penduduk Menurut Lapangan Usaha Tahun 2022.....	27
Tabel 4.5 Indikator Pendidikan	29
Tabel 4.6 Banyaknya Sekolah, Murid, dan Guru Kabupaten Gorontalo Utara.	30
Tabel 4.7 Angka Partisipasi Kasir dan Angka Partispasi Murni Kabupaten Gorontalo Utara	32
Tabel 4.8 Tenaga Kesehatan Menurut Jenis Pekerjaan.....	33
Tabel 4.9 Keadaan Penduduk Desa Tombulilato	36
Tabel 4.10 Keadaan Penduduk Desa Ibarat	43
Tabel 4.11 Presentase Hasil Survey Ketersediaan Lahan Pertanian	50
Tabel 4.12 Presentase Hasil Survey Keadaan Pendidikan Responden	52
Tabel 4.13 Presentase Hasil Survey Keadaan Pendapatan Responden.....	53
Tabel 4.14 Presentase Hasil Survey Keadaan Tempat Tinggal Responden. ...	55

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Presentase Luas Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara	21
Gambar 2 Peta Kabupaten Gorontalo Utara	22
Gambar 3 Peta Kecamatan Atinggola	35
Gambar 4 Peta Kecamatan Anggrek	42

RINGKASAN PENELITIAN

Permasalahan yang dialami oleh KAT di Desa Ibarat Kec. Anggrek dan Desa Tombulilato Kec. Atinggola cukup kompleks, dimana masalah dari kedua desa tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah keterpencilan yang menyebabkan masih sulitnya dalam memperoleh akses pelayanan sosial baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sumberdaya. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menjadi penting untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat komunitas adat terpencil agar mampu mengelola ekonominya secara mandiri melalui potensi sumberdaya alam yang tersedia.

Kepemilikan lahan pertanian oleh masyarakat penerima program KAT di kedua desa masih sangat minim, dimana sebagian besar masyarakat penerima program KAT tersebut tidak memiliki lahan pertanian, sehingga ketersediaan lahan pertanian juga dianggap penting, sebab hal tersebut merupakan salah satu indikator kelangsungan hidup para petani, dimana lahan pertanian menjadi alat produksi ekonomi para petani untuk kelangsungan ekonomi rumah tangga mereka.

Pentingnya program KAT untuk kedua desa ini karena hasil di lapangan menunjukkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Ibarat termasuk dalam kategori masyarakat menengah ke bawah. Disamping itu, angka pengangguran di Desa Ibarat menurut data Profil Desa Ibarat masih cukup besar, yakni ada sekitar 314 penduduk dengan usia 18-56 tahun yang tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan penduduk usia 18-56 tahun yang memiliki pekerjaan berjumlah 221 jiwa. Selain itu, ketersediaan tempat tinggal yang layak masih sangat kurang, sehingga beberapa masyarakat Desa Ibarat masih menumpang di rumah orang tua, mertua, dan saudara. Kedua desa yang menjadi fokus kajian memiliki potensi ekonomi yang sangat penting untuk dikembangkan, sebagai upaya dari pemberian kemampuan terhadap masyarakat dalam mengelola ekonominya secara mandiri. Jika potensi ini dapat dikembangkan dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat dari kedua lokasi yang menjadi fokus kajian tersebut.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Isu kemiskinan nampak masih menjadi fenomena sosial yang menjadi masalah terutama di Negara berkembang seperti Indonesia. Kemiskinan sendiri diartikan sebagai ketidakmampuan individu atau kelompok dalam mencapai taraf kualitas hidup yang memiliki sandang, pangan papan, serta kurangnya akses terhadap sumber daya, pendidikan dan pekerjaan.

Nurwati (2008) menjelaskan faktor timbulnya kemiskinan diantaranya tingkat pendidikan, rendahnya derajat kesehatan, keterbatasan lapangan pekerjaan dan kondisi keterbelakangan. Keterpencilan secara geografis membawa konsekuensi pada terbatasnya akses bagi komunitas adat terpencil atas berbagai layanan sosial, ekonomi dan layanan dalam rangka memenuhi kebutuhan dasar mereka. Dengan keterpencilan secara geografis, maka komunitas ini mengalami keterbatasan untuk menjangkau wilayah lain dalam mendapatkan pemenuhan kebutuhannya. Selain jaraknya yang jauh dan keterbatasan sarana transportasi, maka komunitas ini memerlukan tenaga ekstra agar mampu memenuhi kebutuhannya, selain kebutuhan yang tersedia di wilayahnya. Hal ini tentu menggambarkan kondisi Masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT) yang tentu masih kurang tersentuh pembangunan, mereka masih belum maju dalam bidang sosial, politik dan ekonomi.

Masyarakat Komunitas Adat Terpencil juga tidak terlepas dari belenggu kemiskinan. Ini adalah kemiskinan yang berhimpitan dengan keterbatasan pemenuhan kebutuhan dasar lainnya. Seperti dipahami bersama, untuk sekedar pemenuhan kebutuhan pangan, komunitas adat terpencil tidak mengalami kesulitan yang berarti. Jonatan Lassa (2009) mebgatakan bahwa daerah tertinggal tidak harus identik dengan kekurangan pangan. Hal ini dikarenakan daerah tersebut memiliki persediaan pangan yang dikelola oleh mereka sendiri yakni di bidang pertanian, baik jagung, ubi jalar dan ubi kayu. Namun, untuk pemenuhan

kebutuhan lainnya menjadi hal yang relative sulit, baik kesehatan, pendidikan, pekerjaan, perumahan, air bersih, pertanahan, dll. Pada tataran ini masyarakat daerah tertinggal dapat dikategorisasikan berada pada lingkaran kemiskinan (Kartasasmita, 1996, Somodiningrat, 1999).

Direktorat Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (2013) mengatakan populasi Komunitas Adat Terpencil di Indonesia masih sangat besar yaitu sebanyak 213.080 kepala keluarga. Dari jumlah tersebut populasi yang sudah diberdayakan berjumlah 88.512 kepala keluarga (41,54%), yang sedang diberdayakan berjumlah 5.871 kepala keluarga (2,76 %), sedangkan yang belum diberdayakan sama sekali berjumlah 118.697 kepala keluarga (55,70%). Berdasarkan data ini kita bisa melihat bahwa sesungguhnya lebih dari setengah populasi Komunitas Adat Terpencil di seluruh Indonesia belum diberdayakan. Persebaran Komunitas Adat Terpencil di Indonesia terdapat di 24 provinsi, 263 kabupaten, 1.044 kecamatan, 2.304 desa dan 2.971 lokasi permukiman.

Karakteristik masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat yang termasuk dalam “Komunitas Adat Terpencil” tersebut memiliki kesamaan ciri-ciri dan karakteristiknya antara lain: pertama; mereka hidup dan bermukim pada wilayah yang sulit dijangkau (terpencil, terpencar, dan berpindah-pindah). kedua; taraf kehidupan/ kesejahteraan ekonominya masih sangat rendah; dan ketiga; tertinggal dari berbagai aspek kehidupan.

Berdasarkan data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo Tahun 2012, jumlah populasi warga komunitas adat terpencil sebanyak 2.505 Kepala Keluarga (KK) yang tersebar pada Kabupaten Boalemo, Pohuwato, Kabupaten Gorontalo, Kabupaten Gorontalo Utara dan Kabupaten Bone Bolango. Di lokasi penelitian sendiri di Desa Buhu menurut data Dinas Sosial Provinsi Gorontalo tercatat sebanyak 58 kepala keluarga. Warga Komunitas Adat Terpencil (KAT), di antaranya tinggal dan bermukim di hutan-hutan serta lereng-lereng pegunungan, rawa-rawa, di pinggir-pinggir atau di pesisir-pesisir pantai yang kesemuanya hidup berkelompok serta terpencar pemukimannya antara 5 s/d 6 rumah².

Upaya peberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) sudah dilakukan sedemikian rupa baik riset secara akademik, kebijakan pemerintah, program

sebagai hasil dari peraturan perundangan, serta anggaran yang telah dikeluarkan pemerintah. Namun tentu, hasil belum sesuai target dan harapan, yakni kurangnya gap antara kondisi sosial ekonomi di daerah terpencil dengan daerah lainya.

Sadrlow (1998) mengemukakan salah satu penyebab sulitnya implementasi pelayanan yang terintegrasi adalah adanya konflik kepentingan di antara berbagai pimpinan instansi/lembaga yang memberikan pelayanan sejenis. Pada sisi lain kesulitan berkelanjutan pelayanan sosial terpadu karena budaya organisasi yang cenderung tidak fokus pada penyelesaian pelayanan pemenuhan kebutuhan.

Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil (KAT) menjadi salah satu kegiatan yang merupakan sasaran strategis dari penanggulangan kemiskinan secara nasional. Kebijakan dan program pemerintah menangani penanggulangan kemiskinan seharusnya bisa dilakukan secara sistematis, terencana dan bersinergi dengan masyarakat demi peningkatan kesejahteraan dan upaya percepatan penanggulangan kemiskinan. Oleh karenanya, dari uraian diatas, penelitian ini ingin melihat bagaimana kondisi sosial ekonomi calon penerima program Komunitas Adat Terpencil serta mengidentifikasi sejauhmana potensi ekonomi yang dapat dikembangkan untuk agenda pemberdayaan di lokasi pemukiman Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Gorontalo Utara sesuai dengan keadaan secara geografis dan sosiologis.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana kondisi sosial ekonomi calon penerima program Komunitas Adat Terpencil?
2. Sejauhmana potensi ekonomi pada lokasi pemukiman Komunitas Adat Terpencil yang dapat dikembangkan untuk agenda pemberdayaan masyarakat?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Menganalisis Kondisi Sosial Ekonomi Calon Penerima Program Komunitas Adat Terpencil Untuk menganalisis bagaimana model pemberdayaan pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil berbasis kearifan

lokal dalam pengentasan kemiskinan pada masyarakat KAT di Kabupaten Gorontalo Utara.

2. Mengidentifikasi Sejauhmana Potensi Ekonomi pada Lokasi Pemukiman Komunitas Adat Terpencil yang dapat dikembangkan untuk agenda pemberdayaan masyarakat.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Definisi Konseptual

2.1.1 Kearifan Lokal

Ratna (2013) menyatakan kearifan lokal merupakan sebuah pengikat dalam bentuk kebudayaan yang sudah ada sehingga didasari keberadaan. Kearifan lokal dapat didefinisikan sebagai suatu budaya yang diciptakan oleh aktor-aktor lokal melalui proses yang berulang-ulang, melalui internalisasi dan interpretasi ajaran agama dan budaya yang disosialisasikan dalam bentuk norma-norma dan dijadikan pedoman dalam kehidupan sehari-hari bagi masyarakat.

Dalam karya sastra kearifan lokal jelas merupakan bahasa, baik lisan maupun tulisan Ratna (2011,12) menyatakan alam masyarakat, kearifan-kearifan lokal dapat ditemui dalam cerita rakyat, nyayian, pepatah, sasanti, petuah, semboyan, dan kitab-kitab kuno yang melekat dalam perilaku sehari-hari. Kearifan lokal ini akan mewujudkan menjadi budaya tradisi, kearifan lokal akan tercermin dalam nilai-nilai yang berlaku dalam kelompok masyarakat tertentu.

Dalam kearifan lokal, terkandung pula kearifan budaya lokal. Adapun kearifan budaya lokal ialah pengetahuan lokal (*local knowledge*) yang sudah sedemikian menyatu dengan sistem kepercayaan, norma, dan budaya, serta diekspresikan dalam tradisi dan mitos yang dianut dalam jangka waktu yang lama. Inovasi dan kearifan lokal acapkali dipandang saling bertentangan. Inovasi, sebagai cikal bakal atau pemicu awal bergulirnya perubahan sosial, dianggap mewakili sisi masyarakat yang modern, dinamis, serta penuh semangat untuk mencapai kemajuan. Sedangkan kearifan lokal sering dituding terlalu tradisional, statis, dan cenderung mengandung keinginan mempertahankan keadaan tetap sebagaimana adanya (Santoso, t.t, p. 13).

Asumsi tersebut diperkuat pula oleh pendapat kebanyakan tokoh teori modernisasi bahwa budaya tradisional, termasuk kearifan lokal, merupakan tanda

keterbelakangan dan penghambat dalam pencapaian kemajuan sosial ekonomis. Suatu pendapat yang semakin mengokohkan polarisasi antara inovasi dengan kearifan lokal. Namun, pendapat berbeda dikemukakan oleh Michael R. Dove (1985). Bagi Dove, tradisional tidak harus berarti terbelakang. Dalam kajiannya mengenai interaksi antara kebijaksanaan pembangunan nasional Indonesia dengan beragam budaya maupun kearifan lokal, Dove melihat bahwa budaya tradisional sangat dan selalu terkait dengan proses perubahan ekonomi, sosial, dan politik dari masyarakat pada tempat dimana budaya tradisional tersebut melekat. Jika demikian halnya, menurut Dove, budaya tradisional akan senantiasa mengalami perubahan yang dinamis, sehingga sama sekali tidak menghambat inovasi menuju kemajuan.

Selain itu, dalam bidang pertanian masyarakat Gorontalo umumnya mengenal bentuk kearifan lokal, yang disajikan dalam tabel berikut ini:

Tabel 1. Aspek-aspek dan bentuk kearifan lokal di Gorontalo		
No	Aspek Kearifan Lokal	Bentuk Kearifan Lokal
1.	Aspek Material	<ul style="list-style-type: none"> ❖ Berladang budidaya Jagung ❖ Makanan pokok Ba'alo binti (beras jagung) ❖ Tradisi Jaowali mobisala ⊖ Ritual Molotobu ❖ Tradisi 'mutiayu ❖ Tradisi 'taluwola to

Tabel 1. Aspek-aspek dan bentuk kearifan lokal di Gorontalo		
No	Aspek Kearifan Lokal	Bentuk Kearifan Lokal
		hulipo', ❖ Sistem Kalender Musim Tanam lokal
2.	Aspek Nilai/ gagasan	❖ Perhitungan hari baik berdasarkan 'Lowena' dan 'Kalisuwo' ❖ Semboyan: "...Tooutonu opilmulo lo bongo suburu teto mali pomolowalo binte sababu binte mali suburu olo..”

Sumber: (Fadhilah & Yatim , 2009)

2.1.2 Komunitas Adat Terpencil

Sesuai dengan Keppres RI No.111/1999 tentang Pembinaan Sosial Komunitas Adat Terpencil, yang dimaksud dengan KAT adalah kelompok sosial budaya yang bersifat lokal dan terpecar serta serta kurang atau belum terlibat dalam jaringan dan pelayanan baik sosial, ekonomi maupun politik. Komunitas adat terpencil mempunyai ciri-ciri sebagai berikut :

- a) Berbentuk komunitas kecil, tertutup, dan homogen KAT umumnya hidup dalam kelompok kecil dengan tingkat komunikasi yang terbatas dengan

pihak luar. Disamping itu kelompok KAT hidup dalam satu kesatuan suku yang sama dan bersifat tertutup.

- b) Pranata sosial yang ada dan perkembangan dalam KAT pada umumnya didasarkan pada hubungan kekerabatan dimana kegiatan mereka sehari-hari masih didasarkan pada hubungan darah dan ikatan tali perkawinan. Pranata sosial yang ada tersebut meliputi antara lain pranata ekonomi, pranata kesehatan, pranata hukum, pranata agama, pranata kepercayaan, pranata politik, pranata pendidikan, pranata ilmu pengetahuan, pranata ruang waktu, pranata hubungan sosial, pranata kekerabatan, pranata sistem organisasi sosial.
- c) Pada umumnya terpencil secara geografis dan relatif sulit dijangkau. Secara geografis KAT umumnya berada di daerah pedalaman, hutan, pegunungan, perbukitan, laut, rawa, daerah pantai yang sulit dijangkau. Kesulitan ini diperkuat oleh terbatasnya sarana dan prasarana transportasi, baik ke atau dari kantong KAT. Kondisi ini mempengaruhi dan menghambat upaya pemerintah dan pihak luar dalam memberikan pelayanan pembangunan secara efektif dan terpadu.
- d) Pada umumnya masih hidup dengan sistem ekonomi subsisten. Aktivitas kegiatan ekonomi warga KAT sehari-hari hanya sebatas memenuhi kebutuhan hidupnya sendiri (kebutuhan sehari-hari).
- e) Peralatan teknologinya sederhana. Dalam upaya memanfaatkan dan mengolah SDA untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari baik dalam kegiatan pertanian, berburu, maupun kegiatan lainnya, KAT masih menggunakan peralatan yang sederhana yang diwariskan secara turun-temurun.
- f) Ketergantungan pada lingkungan hidup dan sumber daya alam setempat relatif tinggi. Kehidupan KAT sangat bergantung pada kehidupan kesehariannya baik itu fisik, mental dan spiritual pada lingkungan alam seperti umumnya aktivitas keseharian warga berorientasi pada kondisi alam seperti umumnya aktivitas keseharian warga berorientasi pada kondisi alam atau berbagai kejadian dan gejala alam.

- g) Terbatasnya akses pelayanan sosial, ekonomi dan politik Sebagaimana konsekuensi logis dari keterpencilan, akses berbagai pelayanan sosial ekonomi dan politik yang tersedia dilokasi atau di sekitar lokasi tidak ada atau sangat terbatas sehingga menyebabkan sulitnya warga KAT untuk memperolehnya dalam rangka meningkatkan kualitas hidupnya.

Sementara Hatu (2016) mengatakan bahwa Karakteristik masyarakat pada umumnya khususnya masyarakat yang termasuk dalam “Komunitas Adat Terpencil” tersebut memiliki kesamaan ciri-ciri dan karakteristiknya antara lain: *pertama*; mereka hidup dan bermukim pada wilayah yang sulit dijangkau (terpencil, terpencar, dan berpindah-pindah). *kedua*; taraf kehidupan/ kesejahteraan ekonominya masih sangat rendah; dan *ketiga*; tertinggal dari berbagai aspek kehidupan dan kemajuan masyarakat saat ini yang sudah banyak bersentuhan dengan perkembangan dari suatu wilayah.

2.2 Pemberdayaan Masyarakat

Secara etimologis pemberdayaan atau “daya” mengartikan kekuatan atau kemampuan. Sehingga pemberdayaan dapat dimaknai sebagai suatu proses menuju berdaya, atau proses untuk memperoleh kekuatan/kemampuan dan atau proses pemberian daya/kekuatan/kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang atau belum berdaya.

Makna “memperoleh” daya/ kekuatan/ kemampuan menunjuk pada sumber inisiatif dalam rangka mendapatkan atau meningkatkan daya, kekuatan atau kemampuan sehingga memiliki keberdayaan. Kata “memperoleh” mengindikasikan bahwa yang menjadi sumber inisiatif untuk berdaya berasal dari masyarakat itu sendiri. Dengan demikian masyarakat yang mencari, mengusahakan, melakukan, menciptakan situasi atau meminta pada pihak lain untuk memberikan daya/ kekuatan/ kemampuan. Iklim seperti ini hanya akan tercipta jika masyarakat tersebut menyadari ketidakmampuan/ ketidakberdayaan/ tidak adanya kekuatan, dan sekaligus disertai dengan kesadaran akan perlunya memperoleh daya/ kemampuan/ kekuatan.

Makna kata “pemberian” menunjukkan bahwa sumber inisiatif bukan dari masyarakat. Insisatif untuk mengalihkan daya/ kemampuan/ kekuatan, adalah pihak-pihak lain yang memiliki kekuatan dan kemampuan, misalnya pemerintah atau agen-agen lainnya. Senada dengan pengertian ini Prijono & Pranarka (1996: 77) menyatakan bahwa: pemberdayaan mengandung dua arti. Pengertian yang pertama adalah to give power or authority, pengertian kedua to give ability to or enable. Pemaknaan pengertian pertama meliputi memberikan kekuasaan, mengalihkan kekuatan atau mendelegasikan otoritas kepada pihak yang kurang/ belum berdaya. Di sisi lain pemaknaan pengertian kedua adalah memberikan kemampuan atau keberdayaan serta memberikan peluang kepada pihak lain untuk melakukan sesuatu.

Berkenaan dengan pemaknaan konsep pemberdayaan masyarakat, Winarni mengungkapkan bahwa inti dari pemberdayaan adalah meliputi tiga hal yaitu pengembangan, (enabling), memperkuat potensi atau daya (empowering), terciptanya kemandirian (Tri Winarni, 1998: 75).

Pada hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (enabling). Logika ini didasarkan pada asumsi bahwa tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa memiliki daya. Setiap masyarakat pasti memiliki daya, akan tetapi kadang-kadang mereka tidak menyadari atau daya tersebut masih belum diketahui secara eksplisit. Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan. Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki serta berupaya untuk mengembangkannya. Di samping itu hendaknya pemberdayaan jangan menjebak masyarakat dalam perangkap ketergantungan (charity), pemberdayaan sebaliknya harus mengantarkan pada proses kemandirian. (Tri Winari, 1998: 76).

Pemberdayaan memberikan tekanan pada otonom pengambilan keputusan dari suatu kelompok masyarakat. Penerapan aspek demokrasi dan partisipasi dengan titik fokus pada lokalitas akan menjadi landasan bagi upaya penguatan potensi lokal. Pada aras ini pemberdayaan masyarakat juga difokuskan pada

penguatan individu anggota masyarakat beserta pranata-pranatanya. Pendekatan utama dalam konsep pemberdayaan ini adalah menempatkan masyarakat tidak sekedar sebagai obyek melainkan juga sebagai subyek.

Konteks pemberdayaan, sebenarnya terkandung unsur partisipasi yaitu bagaimana masyarakat dilibatkan dalam proses pembangunan, dan hak untuk menikmati hasil pembangunan. Pemberdayaan mementingkan adanya pengakuan subyek akan kemampuan atau daya (power) yang dimiliki obyek. Secara garis besar, proses ini melihat pentingnya proses ini melihat pentingnya mengalihfungsikan individu yang tadinya obyek menjadi subyek (Suparjan dan Hempri, 2003: 44).

Pemberdayaan sendiri memiliki beberapa tahapan, yakni :

1. Tahap penyadaran dan tahap pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan kapasitas diri.
2. Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan keterampilan agar terbuka wawasan dan memberikan keterampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan.
3. Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan keterampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan inovatif untuk mengantarkan pada kemandirian.

2.3 Partisipasi Masyarakat

Partisipasi anggota masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan, meliputi kegiatan dalam perencanaan dan pelaksanaan (implementasi) program/ proyek pembangunan yang dikerjakan di dalam masyarakat lokal (Rahardjo Adisasmita, 2006: 34). Partisipasi atau peran serta masyarakat dalam pembangunan (pedesaan) merupakan aktualisasi dari kesediaan atau kemampuan anggota masyarakat untuk berkorban dan berkontribusi dalam implementasi program/proyek yang dilaksanakan.

Peningkatan partisipasi masyarakat merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat (social empowerment) secara aktif yang berorientasi

pada pencapaian hasil pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat (pedesaan) (Rahardjo Adisasmita, 2006: 35).

Penyusunan rencana/program pembangunan secara terarah dan serasi dengan kebutuhan masyarakat dan pelaksanaan (implementasi) program secara efektif dan efisien, berarti distribusi dan alokasi faktor- faktor produksi dapat dilaksanakan secara optimal, demikian pula pencapaian sasaran peningkatan produksi dan pendapatan masyarakat, perluasan lapangan kerja (pengurangan pengangguran), berkembangnya kegiatan lokal baru, peningkatan pendidikan dan kesehatan masyarakat, peningkatan keswadayaan dan partisipasi masyarakat akan tercapai secara optimal pula.

Partisipasi dari masyarakat dalam pelaksanaan sebuah program pembangunan mutlak diperlukan, karena masyarakatlah yang pada akhirnya akan melaksanakan program tersebut. Adanya pelibatan masyarakat memungkinkan mereka memiliki rasa tanggung jawab dan handarbeni terhadap keberlanjutan program pembangunan, dengan pendekatan partisipatif, diharapkan partisipasi, potensi dan kreatifitas masyarakat dapat lebih tergali.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Metode dan Pendekatan Penelitian

Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif yaitu data penelitian kualitatif berupa narasi cerita, penuturan informan, dokumen-dokumen pribadi seperti foto, catatan pribadi / *diary* (bukan harian), perilaku, gerak tubuh, dan banyak hal lain yang tidak didominasi angka-angka sebagaimana penelitian kuantitatif. Mengingat sifatnya yang lebih banyak melacak data non angka, maka sebenarnya data penelitian kualitatif begitu banyak dan begitu kompleks (Idrus, 2009, hal. 25). Peneliti memilih metode kualitatif untuk menjelaskan secara rinci dengan menggunakan kata-kata dan juga wawancara secara terbuka kepada responden supaya mendapatkan hasil data berupa urain-urain kata serta dapat memahami bagaimana masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT).

Peneliti menggunakan pendekatan penelitian studi kasus. Studi kasus menurut Robert K. Yin adalah suatu inquiri empiris yang menyelidiki fenomena dalam konteks kehidupan nyata, bilamana batas-batas antar fenomena dan konteks tak tampak dengan tegas dan dimana multi sumber bukti dimanfaatkan. Studi kasus juga merupakan penelitian yang terinci tentang seseorang (individu) atau sesuatu unit sosial selama kurun waktu tertentu. Metode ini akan melibatkan kita dalam penyelidikan yang lebih mendalam dan pemeriksaan yang menyeluruhterhadap perilaku seorang individu. Disamping itu, studi kasus juga dapat mengantarkan peneliti memasuki unit-unit sosial terkecil seperti perhimpunan, kelompok, keluarga, dan berbagai bentuk unit sosial lainnya (K.Yin, 2008, hal. 47).

Studi Kasus digunakan sebagai penjelasan komprehensif yang berkaitan dengan berbagai aspek seseorang, suatu kelompok, suatu organisasi, suatu program atau suatu situasi kemasyarakatan yang diteliti, diupayakan dan di telaah sedalam mungkin. Penelitian studi kasus dapat dibedakan menjadi tiga tipe yaitu studi-studi kasus eksplanatoris, eksploratoris dan deskriptif (K.Yin, 2008, hal. 1).

Penelitian ini menggunakan tipe studi kasus deskriptif digunakan oleh peneliti untuk mendeskripsikan Pemberdayaan berbasis kearifan lokal sebagai upaya pengentasan kemiskinan masyarakat Komunitas Adat Terpencil (KAT).

3.2 Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan pada Komunitas Adat Terpencil di Kabupaten Gorontalo Utara, peneliti merasa bahwa perlu melakukan penelitian-penelitian pada Komunitas Adat Terpencil.

3.3 Teknik Penetapan Informan

Penentuan informan dalam penelitian ini dapat diambil dengan teknik *snowball sampling*. Prosedur dalam pemilihan bola salju yaitu pertama peneliti mengidentifikasi orang yang dianggap dapat memberikan informasi untuk diwawancarai kedua orang ini dijadikan informan untuk mengidentifikasi orang lain yang dapat dijadikan sampel penelitian berikutnya yang dapat memberikan informasi dan orang ini juga dijadikan sebagai informan untuk mengidentifikasi orang lain sebagai sampel yang dapat memberikan informasi (Silalahi, 2009, hal. 273).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

3.4.1 Observasi

Peneliti langsung turun ke lapangan untuk mengamati perilaku dan aktivitas individu-individu di lokasi penelitian. Dalam pengamatan ini, peneliti merekam /mencatat- baik dengan cara terstruktur maupun semistruktur (misalnya, dengan mengajukan sejumlah pertanyaan yang memang ingin diketahui oleh peneliti) aktivitas-aktivitas dalam lokasi penelitian (Creswell, 2009, hal. 267). Peneliti melakukan observasi guna mendapatkan data di lapangan. Peneliti melakukan observasi awal dengan mengunjungi lokasi Komunitas Adat Terpecil. Bukan hanya saat observasi awal saja, ketika informan turun ke lapangan untuk mewawancarai, peneliti tetap melakukan observasi kepada masyarakat seperti bagaimana interaksi mereka, bagaimana kedekatan mereka dengan tetangga dan bagaimana mereka bertani.

3.4.2 Wawancara

Peneliti menggunakan teknik wawancara sebagai dasar untuk memperkuat observasi yang telah dilakukan. Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu. Percakapan itu dilakukan oleh dua pihak yaitu pewawancara dan yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2010, hal. 186). Peneliti melakukan wawancara untuk mengumpulkan banyak data yang bersumber dari responden yang dipilih dengan pertimbangan tertentu. Peneliti membuat beberapa pertanyaan yang mengalir dan wawancara yang tidak terstruktur atau bersifat terbuka supaya responden lebih bisa leluasa menjawab dan bercerita.

3.4.3 Dokumentasi

Selama proses penelitian, peneliti juga bisa mengumpulkan dokumen-dokumen penelitian. Dokumen ini bisa berupa jurnal-jurnal mengenai Komunitas Adat Terpencil (KAT) di provinsi Gorontalo, buku-buku dan foto. Katagori terakhir dari data kualitatif adalah materi audio dan visual. Data ini bisa berupa foto, objek-objek seni, *videotape*, atau segala jenis suara/bunyi (Creswell, 2009, hal. 270). Dokumen-dokumen juga salah satu hal yang penting sebagai bukti bahwa peneliti melakukan kegiatan penelitian dengan turun lapang langsung ke lokasi penelitian untuk mengali data, foto saat mencari data dengan berwawancara menggunakan alat perekam untuk merekam selama wawancara kegiatan turun lapang.

3.5 Keabsahan Data

1. Keabsahan data menggunakan teknik triangulasi. Menurut Moleong (2005, p. 330), triangulasi data adalah teknik pemeriksaan keabsahan data dengan memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanging terhadap data itu. Triangulasi merupakan cara terbaik untuk menghilangkan perbedaan-perbedaan konstruksi kenyataan yang ada dalam konteks suatu studi sewaktu mengumpulkan data mengenai Modal Sosial pada masyarakat Komunitas

Adat Terpencil (KAT). Sehingga dalam penelitian ini, untuk mengukur keabsahan data, peneliti menggunakan triangulasi sumber.

Adapun langkah-langkah yang akan dilakukan untuk mengukur keabsahan data pada penelitian ini, adalah sebagai berikut :

Pertama, Membandingkan data hasil pengamatan dengan hasil wawancara Data- data yang diperoleh dari informan melalui metode wawancara dibandingkan dengan hasil pengamatan di lapangan. Sehingga peneliti dapat dimudahkan menyimpulkan data yang valid dan relevan yang berkaitan dengan topik permasalahan dalam penelitian ini. Peneliti menemukan hasil wawancara dengan hasil pengamatan sangat relevan.

Kedua, membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan. Dengan membandingkan hasil wawancara dengan isi dokumen yang berkaitan, dalam hal ini transkrip wawancara. Apakah sudah sesuai dengan isi dokumen yang relevan dengan topik penelitian, sehingga peneliti yakin untuk memasukan data yang benar-benar valid untuk menjawab permasalahan dalam penelitian ini.

2. *Member checking* dapat dilakukan dengan memberikan peluang kepada informan untuk mengecek akurasi. Peneliti dapat membawa laporan akhir atau deskripsi-deskripsi atau juga tema-tema spesifik kepada informan untuk mengecek apakah mereka merasa laporan atau deskripsi tersebut sudah akurat (Creswell, 2009, p. 287).
3. *Prolonged time* atau memanfaatkan waktu dilapangan atau lokasi penelitian. Dalam hal ini peneliti dapat memahami lebih dalam mengenai fenomena yang diteliti dan dapat menyampaikan secara detail mengenai fenomena yang diteliti. Semakin banyak pengalaman yang dilalui peneliti bersama partisipan dalam *setting* yang sebenarnya, semakin akurat atau valid hasil penelitiannya (Creswell, 2009, p. 288).

3.6 Teknik Analisis Data

Peneliti menggunakan teknik analisis Robert K. Yin. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah untuk membuat laporan tentang hasil penelitian tanpa mengurangi dan menambahi data yang berasal dari lapangan

Teknik analisis data adalah proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat dirumuskan hipotesa kerja (Moleong, 2010, hal. 280). Peneliti menggunakan teknik analisis Robert K. Yin. Data yang diperoleh dari lapangan kemudian diolah untuk membuat laporan tentang hasil penelitian tanpa mengurangi dan menambahi data yang berasal dari lapangan. (K.yin, 2008, hal. 140-150) membagi tiga teknik analisis dominan untuk studi kasus yaitu:

1. Penjodohan pola

Salah satu strategi yang paling disenangi adalah penjodohan pola. Logika seperti membandingkan pola yang didasarkan atas empiri dan pola yang diprediksikan (atau dengan beberapa prediksi alternatif). Jika kedua pola ini ada persamaan, hasilnya dapat menguatkan validitas internal studi kasus yang bersangkutan.

2. Pembuatan eksplanasi

Strategi analisis yang kedua ini pada dasarnya merupakan tipe khusus penjodohan pola, tetapi prosedurnya lebih sulit karenanya patut mendapat perhatian tersendiri. Tujuannya untuk menganalisis data studi kasus dengan cara membuat suatu eksplanasi tentang kasus yang bersangkutan.

3. Analisis deret waktu

Strategi analisis ketiga adalah penyelenggaraan analisis deret waktu, yang secara langsung analog dengan analisis deret waktu yang diselenggarakan dalam eksperimen dan kuasi eksperimen. Dalam teknik atau strategi menganalisis data untuk pendekatan studi kasus, terdapat tiga strategi analisis yang dapat digunakan yaitu penjodohan pola, pembuatan eksplanasi, dan analisis deret waktu. Dari penjelasan yang telah dipaparkan sebelumnya, nantinya peneliti akan menjodohkan atau mencocokkan proporsisi sementara yang dibangun oleh peneliti

dengan proposi empiris yang terjadi pada cakupan penelitian. Selanjutnya jika nantinya kedua proposisi yang dibangun menunjukkan suatu hubungan yang signifikan, adanya kecocokan di antara keduanya maka hasilnya akan dapat menguatkan validitas internal dari studi kasus yang bersangkutan (Yin, 2012: 140).

Analisis penjadohan pola dilakukan dengan cara membuat prediksi alternative sebelum mengumpulkan data dari lapangan. Setelah pengumpulan data selesai maka prediksi alternative yang dibuat pada awal penelitian akan dijaduhkan dengan temuan dilapangan. Inilah proses analisis dari penjadohan pola, jika dalam analisis tersebut sudah ditemukan banyak kesamaan, maka hasil dari penelitian ini akan menguatkan validitas data penelitian tentang peranan modal sosial sebagai kearifan lokal dalam menghindari konflik penguasaan lahan pada masyarakat komunitas adat terpencil (KAT) di Kabupaten Gorontalo Utara.

Proses awal peneliti dalam melakukan analisis yakni peneliti mendapatkan data dari lapangan, data tersebut ditranskrip dalam bentuk susunan kalimat yang ditulis berdasarkan hasil wawancara. Data tersebut dimasukan kedalam bentuk tabel dan membuat tabel penjadohan pola. Selanjutnya proposisi yang didapatkan dilapangan disesuaikan dengan teori yang digunakan oleh peneliti. Peneliti memberikan koding pada proposisi yang ada di transkrip. Selanjutnya peneliti memberikan keterangan pada data yang sudah di proposisikan. Proses terakhir peneliti menjaduhkan pola yang didapatkan dari lapangan dengan pola teoritis. Kemudian peneliti akan melakukan penyajian data secara utuh dari penjadohan pola tersebut dalam kajian yang bersifat naratif. Langkah terakhir ialah membuat penjelasan dengan teknik pembuatan eksplanasi sehingga ditemukan penjelasan dari proposisi akhir.

BAB IV

HASIL PENELITIAN

4.1 GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1.1 Kondisi Geografis

Kabupaten Gorontalo Utara merupakan satu-satunya kabupaten di Provinsi Gorontalo yang berbatasan langsung dengan dua provinsi, yakni Provinsi Sulawesi Tengah di bagian barat dan Provinsi Sulawesi Utara di bagian timur. Kondisi ini juga menjadikan Kabupaten Gorontalo Utara memiliki garis pantai terpanjang di Provinsi Gorontalo yang membentang dari barat ke timur. Kabupaten Gorontalo Utara memiliki 11 kecamatan dengan luas wilayah 1.777,03 KM² atau sebesar 17.22% dari total luas wilayah Provinsi Gorontalo dan merupakan kabupaten terluas ketiga setelah Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Gorontalo.

Secara astronomi, Kabupaten Gorontalo Utara terletak antara 00^o41'23 – 10^o7'55 Lintang Utara dan antara 121^o5'59 – 123^o16'29 Bujur Timur. Wilayah Kabupaten Gorontalo Utara terletak pada ketinggian antara 0 sampai dengan 2.061 meter di atas permukaan laut, dengan 43% diantaranya berada di ketinggian 100 sampai dengan 500 meter di atas permukaan laut. Kondisi topografi Kabupaten Gorontalo Utara adalah mayoritas bergunung-gunung yang terbentang sepanjang pantai utara, yakni dari wilayah Kecamatan Atinggola di sebelah timur sampai di wilayah Kecamatan Tolinggula di bagian barat. Sedangkan kondisi curah hujan di Kabupaten Gorontalo Utara berdasarkan data Badan Meteorologi Klimatologi dan Geofisika Provinsi Gorontalo, rata-rata hari hujan tertinggi terjadi pada bulan Desember dan Mei tahun 2021, yakni sebanyak 23 dan 24 hari hujan. Curah hujan tertinggi terjadi pada bulan Mei 2021, yaitu sebesar 307.9 mm. Sedangkan pada tahun 2022, rata-rata hari hujan tertinggi sebanyak 18 dan 19 hari hujan. Kecepatan angin di tahun 2021 hampir merata pada setiap bulannya, yakni pada kisaran 1.1 sampai 2.7 knot. Sedangkan suhu udara maksimum pada tahun

2021 rata-rata berkisar antara 32.1⁰C samapai 33.5⁰ C dan suhu udara minimum rata-rata berkisar antara 22⁰ C sampai 24.4⁰ C.

Berdasarkan posisi geografisnya, Kabupaten Gorontalo Utara memiliki batas-batas wilayah yang agak berbeda dengan batas-batas wilayah kabupaten lain di Provinsi Gorontalo. Perbedaan tersebut terlihat pada wilayah perbatasan kabupaten yang berbatasan langsung dengan Provinsi Sulawesi Tengah dan Provinsi Sulawesi Utara, juga berbatasan langsung dengan empat kabupaten di wilayah Provinsi Gorontalo. Adapun yang batas-batas wilayah Kabupaten Gorontalo Utara adalah sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi yang terbentang dari timur hingga bagian barat Kabupaten Gorontalo Utara;
- Sebelah Barat berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Utara;
- Sebelah Selatan berbatasan langsung dengan Kabupaten Pohuwato dan Kabupaten Boalemo di bagian barat, Kabupaten Gorontalo di bagian selatan, dan Kabupaten Bone Bolango di bagian timur wilayah Kabupaten Gorontalo Utara; dan
- Sebelah Timur berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara.

Kabupaten Gorontalo Utara terbagi dalam 11 kecamatan yang masing-masing kecamatan memiliki luas wilayah berbeda-beda dan memiliki potensi wilayah yang berbeda-beda pula. Sebelum menjadi daerah yang memiliki pemerintahan yang otonom, Kabupaten Gorontalo Utara hanya memiliki 4 kecamatan, yakni Kecamatan Atinggola, Kecamatan Kwandang, Kecamatan Anggrek, dan Kecamatan Sumalata. Untuk jelasnya mengenai jumlah kecamatan berdasarkan luas wilayah dan persentase luas wilayah dapat dilihat pada tabel 4.1 di bawah ini.

Berdasarkan data tabel 4.1 tersebut, kecamatan yang memiliki luas wilayah terbesar adalah Kecamatan Sumalata dengan luas wilayah 305.59 KM² atau sebesar 17.20 % dari total wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Luas wilayah kecamatan terbesar kedua adalah Kecamatan Atinggola dengan luas 264.54 KM²

atau sebesar 14.90 %. Sedangkan luas wilayah kecamatan yang paling kecil adalah Kecamatan Ponelo Kepulauan dengan luas 7.32 KM² atau sebesar 0.44 % dari total wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Perbedaan luas wilayah dari masing-masing kecamatan disebabkan oleh perbedaan kondisi topografi yang terdiri dari pegunungan yang terbentang dari timur sampai barat Kabupaten Gorontalo Utara.

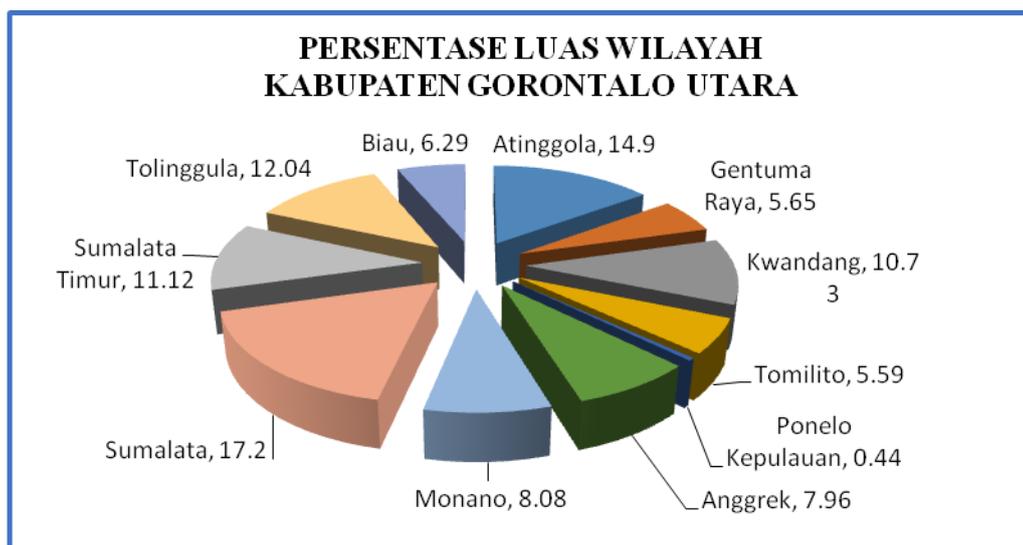
Tabel 4.1

LUAS WILAYAH MENURUT KECAMATAN

Kecamatan	Luas (km ²)	Persentase (%)
Atinggola	264.54	14.89
Gentuma Raya	100.34	5.65
Kwandang	190.75	10.73
Tomilito	99.31	5.59
Ponelo Kepulauan	8.08	0.44
Anggrek	141.51	7.96
Monano	144.02	8.10
Sumalata	305.59	17.20
Sumalata Timur	197.55	11.12
Tolinggula	213.91	12.04
Biau	111.69	6.28
Gorontalo Utara	1.777.02	100.00

Sumber Data: Gorontalo Utara Dalam Angka 2022

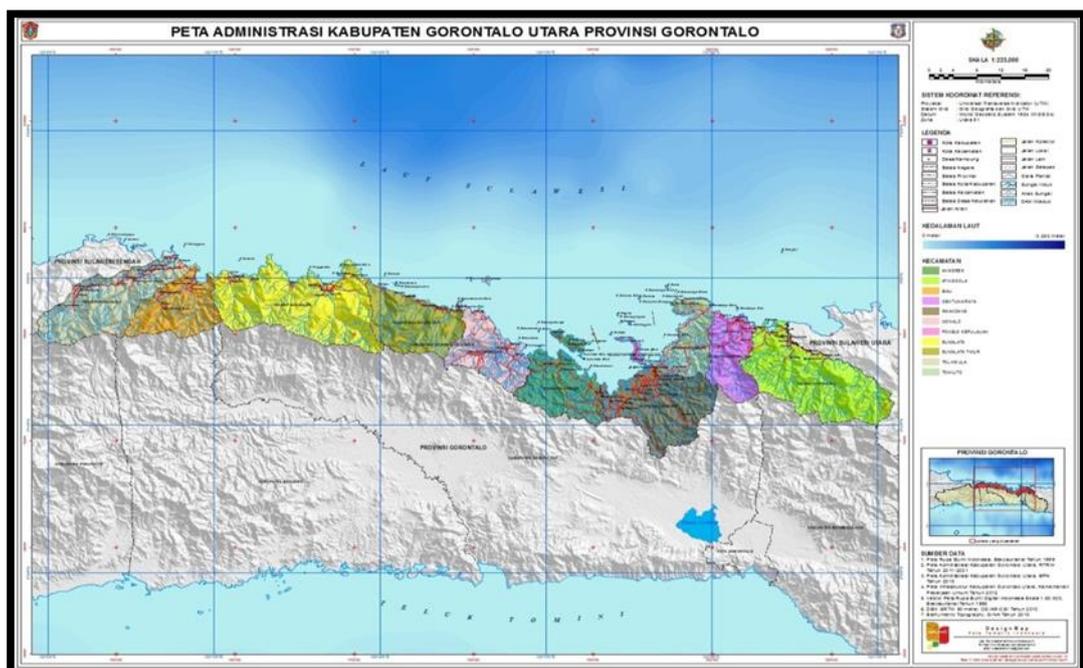
Gambar 4.1



Berdasarkan kondisi geografis Kabupaten Gorontalo Utara, terdapat beberapa keunggulan yang dapat dijadikan sebagai potensi pertumbuhan pembangunan ekonomi masyarakat. *Pertama*, membentangya lintas laut yang dimiliki Kabupaten Gorontalo Utara dari wilayah timur sampai wilayah barat kabupaten menjadi modal dasar pembangunan ekonomi di sektor perikanan dan kelautan. *Kedua*, wilayah timur kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Provinsi Sulawesi Utara dan wilayah barat yang berbatasan langsung dengan Kabupaten Buol Provinsi Sulawesi Tengah dapat dijadikan sebagai penyanggah pertumbuhan ekonomi dengan peluang pasar yang berasal dari kedua provinsi tersebut. *Ketiga*, keadaan sumber daya alam yang cukup potensial menjadi modal utama dalam rangka pertumbuhan ekonomi masyarakat di sektor pertanian, perkebunan, dan peternakan, sehingga akan memudahkan bagi Kabupaten Gorontalo Utara untuk mendistribusi hasil-hasil pertanian tersebut ke wilayah Provinsi Sulawesi Utara dan Provinsi Sulawesi Tengah.

Gambar 2

PETA KABUPATEN GORONTALO UTARA



4.1.2 Kondisi Demografis

4.1.2.1 Keadaan Penduduk

Jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2022 adalah berjumlah 126.521 jiwa dengan rata-rata laju pertumbuhan penduduk sebesar 1.67%. Persebaran penduduk di 11 kecamatan masih belum merata dikarenakan perbedaan potensi wilayah, pusat pemerintahan dan jasa. Persebaran penduduk terpadat lebih terkonsentrasi pada kecamatan-kecamatan yang pertumbuhan ekonominya sudah cukup memadai. Penyebab lainnya juga dikarenakan oleh ketersediaan infrastruktur sehingga konsentrasi penduduk lebih banyak di pusat kabupaten dan pusat-pusat kecamatan, juga disebabkan oleh baru terbentuknya beberapa kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara. Laju pertumbuhan penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara Tahun 2022 tertinggi berada di Kecamatan Gentuma Raya yakni sebesar 2.25% dan laju pertumbuhan penduduk terendah di Kecamatan Ponelo Kepulauan, yakni sebesar 0.84%. Sedangkan tingkat kepadatan penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2022 rata-rata 71 jiwa per kilometer persegi. Tingkat kepadatan penduduk tertinggi berada di Kecamatan Ponelo Kepulauan dengan rata-rata 528 jiwa per kilometer persegi, dan tingkat kepadatan terendah berada di Kecamatan Sumalata dengan rata-rata 38 jiwa per kilometer persegi.

Rasio jenis kelamin (*sex ratio*) untuk tahun 2022 di Kabupaten Gorontalo Utara rata-rata 104 dengan penduduk laki-laki berjumlah 64.594 jiwa atau sebesar 51.05 % dan penduduk perempuan berjumlah 61.927 jiwa atau sebesar 48.95 % dari total penduduk Kabupaten Gorontalo Utara. Hal ini menunjukkan bahwa perbandingan antara penduduk laki-laki dan penduduk perempuan terdapat perbedaan dan hampir seimbang, yakni jumlah penduduk laki-laki lebih banyak dari jumlah penduduk perempuan. Demikian pula, jika dilihat dari piramida penduduk berdasarkan kategori usia, maka pada tahun 2022 penduduk Kabupaten Gorontalo Utara terkategori pada tipe *ekspansive*, yakni sebagian besar penduduk pada kelompok umur muda. Posisi penduduk pada tipe ini menjadi modal dasar bagi pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara untuk meningkatkan

pertumbuhan ekonominya guna peningkatan kesejahteraan masyarakat, karena memiliki tenaga kerja produktif dan potensial. Ketergantungan akan rasio potensi penduduk muda akan menjadi tinggi dan ketergantungan akan rasio potensi penduduk penduduk tua akan semakin rendah. Untuk jelasnya tentang keadaan penduduk Kabupaten Gorontalo Utara dapat di lihat pada tabel keadaan penduduk di bawah ini.

Tabel 4.2

KEADAAN PENDUDUK MENURUT KELOMPOK UMUR

Kelompok Umur	Penduduk		
	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0 – 4	5.092	4.863	9.955
5 – 9	5.198	5.083	10.281
10 – 14	5.942	5.586	11.528
15 – 19	6.226	5.957	12.183
20 – 24	6.313	5.859	12.172
25 – 29	5.919	5.669	11.588
30 – 34	5.277	5.045	10.322
35 – 39	4.683	4.518	9.201
40 – 44	4.394	4.165	8.559
45 – 49	3.918	3.732	7.650
50 – 54	3.389	3.304	6.693
55 – 59	2.895	2.722	5.617
60 – 64	2.085	1.976	4.061
65 – 69	1.400	1.397	2.797
70 – 74	951	1.002	1.953
75+	912	1.049	1.961
Jumlah 2022	64.594	61.927	126.521
2021	63.817	61.140	124.957

Sumber Data: Gorontalo Utara Dalam Angka Tahun 2021 dan 2022

Berdasarkan data tabel di atas, dari tahun 2021 sampai tahun 2022 terjadi peningkatan jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara, baik jenis kelamin laki-laki maupun jenis kelamin perempuan. Jumlah penduduk dengan jenis kelamin laki-laki pada tahun 2021 berjumlah 63.817 jiwa dan pada tahun 2022 berjumlah 64.594 jiwa. Terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk laki-laki dalam kurun waktu 1 tahun sebesar 1.20%. Sedangkan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan pada tahun 2021 berjumlah 61.140 jiwa dan pada tahun 2022

berjumlah 61.927 jiwa, sehingga terjadi peningkatan pertumbuhan penduduk perempuan selama 1 tahun sebesar 1.27%. Dengan demikian, pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin perempuan mengalami peningkatan yang lebih besar jika dibandingkan dengan jumlah pertumbuhan penduduk dengan jenis kelamin laki-laki. Sedangkan untuk keseluruhan jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara, pada tahun 2021 jumlah penduduk sebanyak 124.957 jiwa dan pada tahun 2022 jumlah penduduk berjumlah 126.521 jiwa, atau terjadi peningkatan pertumbuhan jumlah penduduk sebesar 1.24% dalam kurun waktu 1 tahun.

Jika dilihat dari produktifitas penduduk atau penduduk yang produktif berdasarkan skala umur 15 tahun sampai dengan 50 tahun berdasarkan data penduduk tahun 2022, maka penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang digolongkan dalam usia produktif berjumlah 71.675 jiwa atau sebesar 56.65% dari total jumlah penduduk, dengan rincian jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki yang produktif berjumlah 36.730 jiwa atau sebesar 56.86% dari total jumlah penduduk jenis kelamin laki-laki, dan jumlah penduduk jenis kelamin perempuan yang produktif berjumlah 34.945 jiwa atau sebesar 56.43% dari total jumlah penduduk jenis kelamin perempuan. Ini berarti bahwa jumlah penduduk yang produktif di Kabupaten Gorontalo Utara cukup besar dan dapat dijadikan sebagai modal dasar pembangunan Kabupaten Gorontalo Utara.

4.1.2.2 Keadaan Pekerjaan

Status pekerjaan merupakan hal yang terpenting karena menentukan besarnya curahan waktu seseorang terhadap usaha yang dijalannya. Penggolongan pekerjaan ada dua yaitu pekerjaan pokok dan pekerjaan sampingan. Pekerjaan pokok adalah pekerjaan yang secara rutin dilakukan dan menjadi sumber penghasilan keluarga untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dan keluarganya. Sedangkan pekerjaan sampingan adalah pekerjaan yang dikerjakan hanya jika ada waktu senggang dan hasil yang didapatkan hanya sebagai tambahan penghasilan saja.

Tenaga kerja adalah modal dasar bagi geraknya roda pembangunan karena pertumbuhan tenaga kerja yang kurang diimbangi dengan pertumbuhan lapangan kerja akan menyebabkan tingkat kesempatan kerja cenderung menurun. Demikian pula, jumlah penduduk yang berkerja tidak selalu menggambarkan jumlah kesempatan kerja yang ada, hal ini dikarenakan sering terjadinya *mismatch* dalam pasar kerja. Jumlah dan komposisi tenaga kerja akan terus mengalami perubahan seiring dengan berlangsungnya proses demografi.

Dari total penduduk usia kerja (15 tahun ke atas) di Kabupaten Gorontalo Utara, yang termasuk usia angkatan kerja sebesar 70.56%. Jumlah usia kerja ini termasuk cukup tinggi sehingga akan memudahkan pemerintah untuk menjalankan dan menggerakkan roda pemerintahan, khususnya di bidang ekonomi dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Tingkat partisipasi angkatan kerja mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan tahun 2021, yakni dari 70.44% menjadi 70.56% pada tahun 2022 dari total jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara. Penduduk usia kerja terdiri dari angkatan kerja dan bukan angkatan kerja. Usia yang bukan angkatan kerja adalah mereka yang sedang mengikuti pendidikan dan yang berprofesi sebagai pengurus rumah tangga.

Berdasarkan lima sektor utama lapangan usaha, sektor pertanian yang masih mendominasi pasar kerja di Kabupaten Gorontalo Utara dengan persentase sebesar 52.85% pada tahun 2022, kemudian diikuti oleh sektor jasa, yakni sebesar 15.52% dan sektor perdagangan sebesar 10.62%. Sedangkan tingkat pengangguran pada tahun 2022 tercatat sebesar 2.75%. Jika dibandingkan dengan tingkat pengangguran di tahun 2021, maka pada tahun 2022 terjadi penurunan. Hal ini dikarenakan oleh dimekarkannya beberapa kecamatan sehingga membutuhkan banyaknya aparatur pemerintahan dan juga karena makin pesatnya pertumbuhan ekonomi. Lebih jelasnya terlihat pada tabel 4.3 di bawah.

Tabel 4.3

**PERSENTASE KEADAAN PENDUDUK
MENURUT JENIS KEGIATAN UTAMA TAHUN 2022
(DALAM %)**

Jenis Kegiatan Utama	Jenis Kelamin		Jumlah
	Laki-Laki	Perempuan	
I. Angkatan Kerja			
1. Bekerja	44.38	24.28	60.62
2. Pengangguran	0.61	1.33	1.94
II. Bukan Angkatan Kerja			
1. Sekolah	3.60	2.49	6.09
2. Mengurus Rumah Tangga	0.54	19.83	20.37
3. Lainnya	1.71	1.27	2.90
Total Jumlah	50.79	49.21	100.00
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja	88.50	52.04	70.56
Tingkat Pengangguran	1.36	5.81	2.72

Sumber Data: Gorontalo Utara Dalam Angka 2022

Pada tabel 4.3 di atas, keadaan penduduk umur 15 tahun ke atas yang bekerja berdasarkan kategori angkatan kerja sebesar 60.62% dan pengangguran pada kategori angkatan kerja sebesar 1.94%. Serapan lapangan kerja pada penduduk yang bekerja dengan kategori angkatan kerja di Kabupaten Gorontalo Utara termasuk cukup tinggi. Sedangkan keadaan penduduk yang bukan angkatan kerja dengan indikator sekolah sebesar 6.09%, dan indikator mengurus rumah tangga sebesar 20.37%, serta lainnya sebesar 2.90%. Sedangkan tingkat partisipasi angkatan kerja Kabupaten Gorontalo sebesar 70.56% dengan rincian tingkat partisipasi kerja laki-laki sebesar 88.50% dan perempuan sebesar 52.04%.

Tabel 4.4

PENDUDUK MENURUT LAPANGAN USAHA TAHUN 2022

Lapangan Usaha	Laki-Laki	Perempuan
Pertanian	71.49	28.51
Industri Pengolahan	37.71	62.29
Perdagangan dan Rumah Makan	33.48	66.52
Jasa Kemasyarakatan	44.93	55.07
Lainnya (Pertambangan, Listrik,	95.90	04.10

Gas, Air, Bangunan, Transportasi dan Keuangan)

Sumber Data: Gorontalo Utara Dalam Angka 2022

Angkatan kerja yang bekerja pada lapangan usaha pertanian (termasuk sektor perikanan) cukup tinggi jika dibandingkan dengan lapangan usaha lainnya. Potensi sumber daya alam menjadi faktor utama mengapa penduduk di Kabupaten Gorontalo Utara bekerja pada lapangan usaha ini. Lapangan usaha pada sektor pertanian ini lebih didominasi oleh laki-laki, yakni sebesar 71.49%, sedangkan perempuan hanya sebesar 28.51%. Pada lapangan usaha sektor industri pengolahan menyerap tenaga kerja, laki-laki sebesar 37.71% dan perempuan sebesar 62.29%. Sedangkan pada sektor jasa kemasyarakatan, yang bekerja pada lapangan usaha ini, laki-laki sebesar 44.90% dan perempuan sebesar 55.07%. Pada lapangan usaha ini lebih didominasi oleh tenaga kerja perempuan. Untuk jelasnya tentang keadaan penduduk berumur 15 tahun ke atas yang bekerja menurut lapangan usaha dan jenis kelamin di Kabupaten Gorontalo Utara tahun 2022 dapat dilihat pada tabel 4.4 di atas.

Sedangkan penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2022 sebesar 17.23%. Angka kemiskinan di tahun 2022 ini termasuk mengalami kenaikan jika dibandingkan dengan keadaan penduduk miskin di tahun 2020 dan 2021. Di tahun 2020 jumlah penduduk miskin di Kabupaten Gorontalo Utara sebesar 16.95% dan sempat turun di tahun 2021 yakni sebesar 16.88% (sumber: BPS Kabupaten Gorontalo Utara/ Survey Sosial Ekonomi Nasional).

4.1.2.2 Keadaan Pendidikan

Pendidikan mempunyai peranan dalam meningkatkan kualitas manusia sebagai sumberdaya pembangunan dan menjadi titik sentral pembangunan. Laju perubahan sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi kemudian harus disejajarkan dengan penyediaan sumber daya manusia yang berkualitas. Pendidikan kemudian menjadi pioner utama dalam rangka menyiapkan sumber daya manusia dan merupakan salah satu aspek pembangunan yang sekaligus syarat mutlak untuk mewujudkan pembangunan daerah. Salah satu aspek terpenting dalam menyiapkan dan merekayasa arah perkembangan

masyarakat dalam pembangunan nasional adalah melalui pendidikan. Dalam upaya peningkatan peran pendidikan dalam pembangunan, maka kualitas pendidikan harus ditingkatkan, tentu hal ini tidak dapat dipisahkan dari berbagai faktor yang terkait baik secara langsung maupun tidak langsung. Beberapa program pemerintah telah diupayakan sebagai sebuah alternatif dalam rangka menyiapkan dan meningkatkan mutu pendidikan.

Ketersediaan sarana pendidikan maupun tenaga pengajar atau guru akan sangat menunjang dalam meningkatkan partisipasi pendidikan dalam pembangunan daerah. Sarana pendidikan dan tenaga pengajar merupakan salah satu tolok ukur peningkatan kualitas sumber daya manusia. Selain sarana pendidikan dan tenaga pengajar, partisipasi masyarakat dalam pendidikan juga memegang peranan penting dalam pembangunan sumber daya manusia. Untuk jelasnya mengenai indikator pendidikan, angka partisipasi sekolah, dan banyaknya sarana pendidikan dapat dilihat pada tabel-tabel di bawah ini.

Berdasarkan tabel 4.5 di bawah, angka melek huruf di Kabupaten Gorontalo Utara pada tahun 2022 sebesar 96.67%. Angka ini cukup tinggi jika dibandingkan dengan angka melek huruf di tahun 2021, yakni hanya sebesar 94.89% atau naik sebesar 1.78%. Sedangkan rata-rata lama sekolah per tahun adalah 6.9 tahun pada tahun 2022 dan 6.5 tahun pada tahun 2021. Ini berarti bahwa rata-rata lama sekolah atau rata-rata waktu penyelesaian studi mengalami kenaikan sebesar 0.4 tahun.

Tabel 4.5

INDIKATOR PENDIDIKAN

INDIKATOR	2021	2022
Angka Melek Huruf (%)	94.89	96.67
Rata-rata Lama Sekolah (Tahun)	6.50	6.93
Rasio Murid – Guru SD atau Sederajat	15	14
Rasio Murid – Guru SMP atau Sederajat	10	10
Rasio Murid – Guru SMA atau Sederajat	13	12

Sumber Data: Gorontalo Utara Dalam Angka 2022

Rasio murid dan guru untuk Sekolah Dasar (SD) dan sederajat dan Sekolah Menengah Atas (SMA) dan sederajat pada tahun 2022 mengalami peningkatan mutu pada jumlah murid yang diampu oleh satu orang guru jika dibandingkan dengan tahun 2021. Hal ini dikarenakan oleh; *pertama*, pada tahun 2022 jumlah partisipasi belajar (murid) lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah partisipasi belajar (murid) pada tahun 2021, *kedua*, pada tahun 2022 jumlah guru lebih banyak dibandingkan dengan jumlah guru pada tahun 2021. Rasio antara jumlah murid dan guru pada tahun 2022 untuk tingkat Sekolah Dasar (SD) atau sederajat berjumlah 14 dan di tahun 2021 berjumlah 15. Sedangkan rasio antara jumlah murid dan guru untuk tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat pada tahun 2021 dan tahun 2022 adalah sama, yakni berjumlah 10. Dan untuk rasio antara jumlah murid dan guru tingkat Sekolah Menengah Atas (SMA) atau sederajat, yakni pada tahun 2022 berjumlah 12 dan pada tahun 2021 berjumlah 13.

Berdasarkan tabel 4.6 tentang sekolah, guru, dan murid di Kabupaten Gorontalo Utara untuk indikator sekolah, pada tingkat Sekolah Dasar atau sederajat jumlah sekolah pada setiap tahun bertambah. Pada tahun 2020 jumlah gedung sekolah 146 gedung, tahun 2021 jumlah gedung sekolah 146 gedung, dan pada tahun 2022 jumlah gedung sekolah 146 gedung. Demikian pula pada indikator jumlah murid, dari tahun 2020 sampai tahun 2022 jumlah murid Sekolah Dasar atau sederajat mengalami penurunan. Hal ini dapat dilihat pada tabel 4.6 di bawah ini.

Tabel 4.6

**BANYAKNYA SEKOLAH, MURID, DAN GURU
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

INDIKATOR	TAHUN		
	2020	2021	2022
Sekolah:			
1. SD atau Sederajat	146	146	146
2. SMP atau Sederajat	55	55	55
3. SMA atau Sederajat	20	20	20
Murid:			

1. SD atau Sederajat	14.197	13.844	13.464
2. SMP atau Sederajat	6.724	6.835	6.373
3. SMA atau Sederajat	5.764	5.922	5.841
Guru:			
1. SD atau Sederajat	1.235	1.384	1.206
2. SMP atau Sederajat	703	715	696
3. SMA atau Sederajat	432	459	418

Sumber Data: Hasil olahan dari Gorontalo Utara Dalam Angka 2022

Pada tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat, tentang keadaan jumlah sekolah tetap dari tahun 2020 sampai tahun 2022. Sedangkan keadaan jumlah murid dan jumlah guru terutama antara tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan. Demikian pula pada tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat, jumlah sekolah tetap, namun untuk jumlah murid dan guru antara tahun 2021 dan tahun 2022 mengalami penurunan. Untuk jelasnya dapat dilihat pada tabel 4.6 di atas. Penurunan jumlah murid atau siswa baik ditingkat SD atau sederajat selain karena keberhasilan penurunan angka kelahiran di Kabupaten Gorontalo Utara, juga sebagian kecil dikarenakan terjadinya migrasi penduduk dari Gorontalo Utara ke daerah-daerah lain di Provinsi Gorontalo. Keadaan ini juga berimbas pada penurunan jumlah siswa di tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat dan tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat. Yang paling banyak penurunan jumlah murid atau siswa berada di tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat.

Sedangkan keadaan guru di Kabupaten Gorontalo Utara antara tahun 2021 ke tahun 2022 jumlah guru juga mengalami penurunan. Penurunan jumlah guru terbanyak adalah di tingkat Sekolah Dasar atau sederajat. Hal ini dikarenakan sebagian guru terutama yang memiliki tingkat pendidikan minimal sarjana dimanfaatkan oleh pihak Pemerintah Daerah Kabupaten Gorontalo Utara pada posisi jabatan struktural di hampir semua dinas dan badan Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 4.7

**ANGKA PARTISIPASI KASAR DAN ANGKA PARTISIPASI MURNI
KABUPATEN GORONTALO UTARA**

JENJANG PENDIDIKAN	APK		APM	
	2021	2022	2021	2022
SD atau Sederajat	105.13	103.35	98.90	98.89
SMP atau Sederajat	90.34	88.98	81.16	81.62
SMA atau Sederajat	75.01	77.43	60.83	60.93

Sumber Data: Gorontalo Utara Dalam Angka 2022

Berdasarkan tabel 4.7 di atas, maka terlihat bahwa Angka Partisipasi Kasar (APK) pada tahun 2022 untuk tingkat Sekolah Dasar atau sederajat sebanyak 103.35, tingkat Sekolah Menengah Pertama atau Sederajat sebanyak 88.98, dan tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebanyak 77.43. Sedangkan Angka Partisipasi Murni (APM) pada tahun 2022 untuk tingkat Sekolah Dasar atau sederajat sebanyak 98.89, tingkat Sekolah Menengah Pertama atau sederajat sebanyak 81.62, dan untuk tingkat Sekolah Menengah Atas atau sederajat sebanyak 60.93.

4.1.2.2 Keadaan Kesehatan

Pembangunan kesehatan merupakan upaya untuk memenuhi salah satu hak dasar rakyat, yaituhak untuk memperoleh pelayanan kesehatan. Pembangunan kesehatan harus dipandang sebagai suatu investasi untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia, yang antara lain diukur dengan Indeks Pembangunan Manusia. Kesehatan adalah salah satu komponen utama selain pendidikan dan pendapatan dan juga merupakan investasi untuk mendukung pembangunan ekonomi masyarakat serta memiliki peran penting dalam upaya penanggulangan kemiskinan. Dalam pelaksanaan pembangunan kesehatan dibutuhkan perubahan pandangan dari paradigma sakit ke paradigma sehat.

Pembangunan di bidang kesehatan dapat dilihat dari jumlah fasilitas yang ada, serta jumlah tenaga medis yang bertugas memberi pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Pada tahun 2022 jumlah fasilitas kesehatan di Kabupaten

Gorontalo Utara relatif tidak terlihat perubahan atau perkembangannya dari tahun 2021. Perubahan terlihat hanya terjadi pada jumlah Puskesmas Pembantu yang bertambah, jumlah Pos Kesehatan Desa yang juga bertambah, dan jumlah polindes yang sebelumnya sudah tidak berfungsi dan kemudian difungsikan kembali, dan jumlah Puskesmas Keliling baik darat maupun laut yang juga dimanfaatkan secara maksimal oleh pihak Dinas Kesehatan Kabupaten Gorontalo Utara.

Tabel 4.8

TENAGA KESEHATAN MENURUT JENISPEKERJAAN

TENAGA KESEHATAN	TAHUN	
	2021	2022
Dokter	42	40
Perawat	269	207
Bidan	225	156
Farmasi	42	40
Ahli Gizi	45	27
Kesehatan Lingkungan	26	26
Kesehatan Masyarakat	56	56

Sumber Data: Hasil olahan dari Gorontalo Utara Dalam Angka 2022

4.2 Karakteristik Responden

Responden dalam penelitian ini adalah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara yang tersebar pada 2desa, yakni Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara dan Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Kuesioner pada penelitian ini disebar kepada 112 responden dengan masing-masing desa dengan rincian Desa Tombulilato 68 responden dan Desa Ibarat 44 responden yang terdiri dari kategori kepala keluarga berjumlah 101 kepala keluarga, kategori pemerintah desa berjumlah 5 orang, dan kategori masyarakat umum berjumlah 6 orang. Responden di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 38.67% dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 61.33%.Sedangkan responden di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek yang berjenis kelamin laki-laki sebesar 43.13 % dan yang berjenis kelamin perempuan sebesar 56.87 %.

Tingkat pendidikan responden yang terbesar adalah responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Atas (SMA) berjumlah 97 orang responden atau sebesar 86.61%, responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau sederajat berjumlah 11 orang responden atau sebesar 9.82%, dan responden dengan pendidikan terakhir Sekolah Dasar (SD) atau sederajat berjumlah 4 orang responden atau sebesar 3.57% dari total jumlah responden pada penelitian ini.

Untuk sebaran usia sebanyak 10,9% berusia kurang dari 30 tahun, 44,9% berusia 30-40 tahun, 37,8% responden berusia antara 41-45 tahun, dan 6,4% responden berusia lebih dari 45 tahun. Untuk responden yang telah bekerja, dalam penelitian ini yang diukur adalah berdasarkan masa kerja. Umumnya pekerjaan responden adalah petani ladang yang terdapat di perbukitan dan lahan datar yang jauh dari pemukiman penduduk.

Karakteristik responden yang bekerja di ladang perbukitan dan lahan datar yang jauh dari pemukiman ini dengan sengaja diambil dari kelompok keluarga, karena berhubungan Program Komunitas Adat Terpencil. Kategorisasi kelompok responden juga di dasarkan atas pilihan pemerintah desa karena kelompok keluarga ini adalah kelompok penerima bantuan Program Komunitas Adat Terpencil yang di prakarsai langsung oleh Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara. Tujuan penetapan responden ini adalah guna menggali informasi tentang, keadaan ekonomi responden yang juga penerima bantuan, keadaan pendidikan responden, keadaan pekerjaan responden, keadaan tempat tinggal responden, dan terutama adalah keadaan lokasi tempat kerja responden. Selain itu juga melihat keadaan calon lokasi Komunitas Adat Terpencil di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

4.3 Deskripsi Lokasi Komunitas Adat Terpencil

4.3.1 Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola

Kecamatan Atinggola adalah merupakan salah satu kecamatan dari 11 kecamatan yang ada di Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Atinggola terdiri dari 14 desa yang memiliki jumlah penduduk terbesar ketiga di Kabupaten

Gorontalo Utara yakni, berjumlah 12.249 jiwa atau sebesar 9.68% dari total jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara. Laju pertumbuhan penduduk per tahun Kecamatan Atinggola adalah sebesar 1.41% dari jumlah populasi penduduk yang ada.

Secara geografi, Kecamatan Atinggola berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi di sebelah utara, Provinsi Sulawesi Utara di sebelah timur, Kabupaten Bone Bolango di sebelah selatan, dan Kecamatan Gentuma Raya di sebelah barat. Luas wilayah Kecamatan Atinggola termasuk luas wilayah terbesar kedua setelah Kecamatan Sumalata, yakni sebesar 14.89% dari total wilayah Kabupaten Gorontalo Utara. Selain itu, Kecamatan Atinggola juga memiliki 14 desa dan 53 dusun yang hampir sebagian besar adalah dusun pertanian dan sebagian kecil dusun pesisir pantai.



Gambar 2

PETA KECAMATAN ATINGGOLA

Salah satu desa dari 14 desa yang ada di Kecamatan Atinggola adalah Desa Tombulilato yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2010 dan merupakan pemekaran dari Desa Buata Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara. Desa Tombulilato terdiri dari 3 dusun dengan keadaan geografi terdiri dari pegunungan di sebelah selatan dan sungai yang membentang di sebelah selatan. Umumnya penduduk Desa Tombulilato bekerja sebagai petani, hal ini dikarenakan cukup luasnya area pertanian dengan kondisi tanah yang subur.

Masyarakat Desa Tombulilato berasal dari suku Gorontalo, Mongondow, Jawa, dan Bugis. Dari ketiga suku ini sebagian besar berasal dari suku Gorontalo. Masyarakat yang berasal dari suku Gorontalo sendiri merupakan penduduk Atinggola sedangkan sebagian kecil berasal dari Suwawa, Paguyaman, dan daerah sekitar Kabupaten Gorontalo Utara. Selanjutnya untuk suku Mongondow berasal dari daerah Bolaang Mongondow Utara (Bolmut). Kehadiran suku Mongondow ini juga selain letak geografi yang sangat berdekatan antara Bolmut dan Atinggola, juga karena adanya hubungan perkawinan masyarakat antara kedua entitas yang berbeda tersebut. Perihal agama yang dianut masyarakat Desa Tombulilato, bahwa mayoritas masyarakat Desa Tombulilato beragama Islam.

Penduduk Desa Tombulilato termasuk penduduk terbanyak kedua di Kecamatan Atinggola setelah Desa Imana Kecamatan Atinggola. Jumlah penduduk Desa Tombulilato adalah berjumlah 1.045 jiwa atau sebesar 8.53% dari total jumlah penduduk Kecamatan Atinggola. Untuk jelasnya keadaan penduduk Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dapat dilihat pada tabel 4.9 di bawah ini.

Tabel 4.9

KEADAAN PENDUDUK DESA TOMBULILATO

INDIKATOR	TAHUN	
	2021	2022
Jumlah Penduduk	1.045	1.076
Kepadatan Penduduk	45.82	45.89
Laju Pertumbuhan	1.59	1.59

Rasio Jenis Kelamin	115.9	115.9
----------------------------	-------	-------

Sumber Data: Kecamatan Atinggola Dalam Angka 2022

Komposisi penduduk Desa Tombulilato yakni penduduk perempuan sebanyak 569 Jiwa dan jumlah penduduk laki-laki sebanyak 507 Jiwa. Sedangkan untuk jumlah Kepala Keluarga sebanyak 308 KK. Berdasarkan usia, jumlah penduduk Desa Tombulilato yang berusia 0-15 tahun sebanyak 79 Jiwa, kemudian penduduk berusia 15-69 sebanyak 923 Jiwa, selanjutnya penduduk yang berusia 65 ke-atas sebanyak 74 Jiwa. Jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding dengan usia tidak produktif. Perhitungan usia produktif berdasarkan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disingkat BPS) diukur pada rentang usia 15-65 Tahun, sedangkan usia tidak produktif diukur pada rentang usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Jika merujuk pada perhitungan usia produktif berdasarkan BPS, maka diketahui bahwa jumlah usia produktif di Desa Tombulilato lebih besar jumlahnya dibandingkan dengan usia tidak produktif.

Pada tahun 2022 ini, pemerintah melakukan pengusulan program Komunitas Adat Terpencil sebanyak 50 KK. Pemerintah telah melakukan proses seleksi bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan program tersebut. Dan, prioritas utama pemerintah adalah warga yang kondisi ekonominya kurang mampu, terutama warga yang tidak memiliki tempat tinggal.

Keadaan ekonomi masyarakat Desa Tombulilato termasuk dalam kategori masyarakat menengah ke bawah. Kurang lebih ada sekitar 84 Jiwa yang masih tergolong kurang mampu. Hal ini juga disebabkan oleh pendidikan dan keterampilan masyarakat pada umumnya masih tergolong rendah. Disamping itu, permasalahan ekonomi yang menjadi perhatian pemerintah Desa Tombulilato adalah warga yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak, dan juga jumlah KK yang tinggal dalam satu rumah. Menurut informasi di lapangan, diketahui bahwa dalam satu rumah ditempati 2 sampai 4 KK.

Rata-rata warga Desa Tombulilato yang tinggal dalam satu rumah statusnya masih menumpang di rumah orang tua maupun mertua. Bahkan ada juga sebagian kecil warga yang masih menumpang di rumah saudara. Merujuk informasi dari Kepala Desa Tombulilato, bahwa perbandingan antara jumlah KK

dengan ketersediaan tempat tinggal cukup jauh, dimana jumlah Kepala Keluarga sebanyak 308 menempati sekitar 218 unit rumah. Jika idealnya 1 KK menempati 1 unit rumah, maka dari jumlah 308 KK hanya ada sekitar 218 KK yang bisa menempati 218 unit rumah, sedangkan sekitar 90 KK berpotensi tidak memiliki tempat tinggal.

Kondisi ini yang kemudian menjadi perhatian bersama dari pemerintah Desa Tombulilato, dimana ketersediaan fasilitas khususnya tempat tinggal merupakan hal paling urgen untuk diprioritaskan. Sebab, kondisi tempat tinggal yang saat ini dimiliki masyarakat masih belum bisa dikatakan ideal karena dalam satu rumah terdapat 2-4 KK yang tinggal dan menetap di dalamnya.

Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Desa Tombulilato sebagian besar merupakan masyarakat Gorontalo yang tinggal di Kecamatan Atinggola dan sebagian lagi berasal dari luar Kecamatan Atinggola. Disamping itu ada beberapa juga yang berasal dari daerah tetangga yakni suku Mongondow, namun sudah lama bermukim dan tinggal di Desa Tombulilato. Sedangkan untuk agama yang dianut masyarakat Komunitas Adat Terpencil, mayoritas dari masyarakat tersebut beragama Islam. Setelah dikonfirmasi dalam wawancara dan diskusi kelompok, diketahui bahwa seluruh masyarakat Komunitas Adat Terpencil merupakan warga Desa Tombulilato dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Keadaan ekonomi masyarakat komunitas adat terpencil yang berjumlah 50 KK termasuk dalam kategori miskin. Disamping itu, masyarakat komunitas adat terpencil yang berjumlah 50 KK tersebut merupakan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga dengan adanya program ini cukup membantu masyarakat yang berjumlah 50 KK tersebut. Sebagian besar dari masyarakat tersebut hanya menumpang di rumah orang tua, mertua, dan saudara. Selanjutnya, untuk mata pencaharian masyarakat komunitas adat terpencil yang berjumlah 50 KK sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan komoditas pertanian yang ditanam adalah jagung. Perihal pendidikan, masyarakat komunitas adat terpencil memiliki rata-rata pendidikan yang cukup rendah yakni lulusan SD dan SMP.

Pendapatan masyarakat komunitas adat terpencil berbeda-beda, sebab dari konteks pekerjaan saja sudah berbeda, dimana ada sebagian masyarakat bekerja sebagai petani pemilik lahan, ada juga yang bekerja sebagai petani penggarap. Rata-rata pendapatan para petani penggarap yakni Rp.1.000.000/bulan, sedangkan untuk petani pemilik rata-rata pendapatan berkisar Rp.1.000.000 – Rp. 2.000.000. Pendapatan petani penggarap maupun petani pemilik lahan terganggu pada alam, sebab jika cuaca bagus maka berdampak pada hasil produksi jagung mereka. Terkait pengelolaan lahan pertanian, masyarakat komunitas adat terpencil masih bergantung pada pola pengelolaan yang tradisional.

Merujuk pada hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa jarak pemukiman baru komunitas adat terpencil dengan pemukiman desa sejauh 1 km. Jarak ini tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat komunitas adat terpencil, hanya saja permintaan masyarakat adalah akses jalan dari pemukiman baru menuju pemukiman penduduk desa perlu diperbaiki agar layak dan memudahkan akses masyarakat dalam beraktivitas, terutama dalam mengakses pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana prasarana lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat komunitas adat terpencil.

Hal ini menjadi perhatian penting untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi di beberapa lokasi komunitas adat terpencil, dimana permasalahan yang timbul disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat komunitas adat terpencil untuk mengakses sarana dan prasarana sehingga membuat masyarakat komunitas adat terpencil meninggalkan pemukiman mereka dan kembali tinggal di lokasi asal mereka. Realitas ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan program tersebut. Jika bisa dipertimbangkan, maka alternatif lain yang perlu untuk dilakukan adalah sarana dan prasarana seperti Sekolah, Pustu, Masjid, Pasar, Air Bersih, dan sarana lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dibangun di lokasi pemukiman komunitas adat terpencil agar masyarakat terpenuhi semua kebutuhan sehari-hari mereka.

Pada konteks lain, selain sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk diakses, perlu juga dipertimbangkan jarak antara pemukiman komunitas adat terpencil dengan lahan pertanian masyarakat. Alternatif yang bisa diambil yakni bagi masyarakat yang jarak lokasi lahan pertaniannya jauh dari pemukiman yang telah disediakan, maka perlu dilakukan pembukaan lahan baru agar masyarakat yang lahan pertaniannya jauh dari pemukiman tersebut dapat beraktivitas tanpa harus menempuh jarak yang berkilo-kilo meter. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat yang telah diwawancarai, rata-rata jarak lahan pertanian mereka berjarak 500 meter hingga 1 km dari pemukiman komunitas adat terpencil. Hanya ada beberapa orang yang jarak lahan pertaniannya sejauh 2 km sampai 7 km. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah agar menyiapkan alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Merujuk pada informasi di lapangan, diketahui bahwa aspek lingkungan pada pemukiman komunitas adat terpencil cukup baik tidak rawan bencana, kebakaran, gempa, kejahatan, longsor, binatang buas, dan hal-hal lain yang membahayakan. Bahkan pada data Indeks Desa Membangun, Desa Tombulilato memiliki Indeks Ketahanan Lingkungan (IKL) yang cukup baik dengan presentasi sebesar 38.1% dibanding dengan indikator IDM lainnya seperti Indeks Ketahanan Ekonomi (IKE) sebesar 27.9% dan Indeks Ketahanan Sosial (IKS) sebesar 34.0%.

Pada konteks aspek lingkungan dalam hal ini lingkungan masyarakat, kemudahan dalam melakukan kontak sosial juga menjadi harapan warga yang akan bermukim di pemukiman komunitas adat terpencil, sebab hubungan-hubungan kekerabatan maupun kekeluargaan tetap terjaga dengan baik meskipun masyarakat telah memiliki pemukiman baru. Masyarakat memiliki keinginan agar lokasi pemukiman baru tidak terlalu jauh dari pemukiman mereka sebelumnya, agar hubungan-hubungan sosial tetap terjaga. Selain kontak sosial secara langsung, masyarakat tentunya memiliki keinginan untuk tetap berkomunikasi lewat kontak jarak jauh dengan cara menggunakan alat komunikasi seperti *handphone*, maka dari itu harapan besar masyarakat untuk

pengadaan jaringan telekomunikasi perlu menjadi perhatian pemerintah.

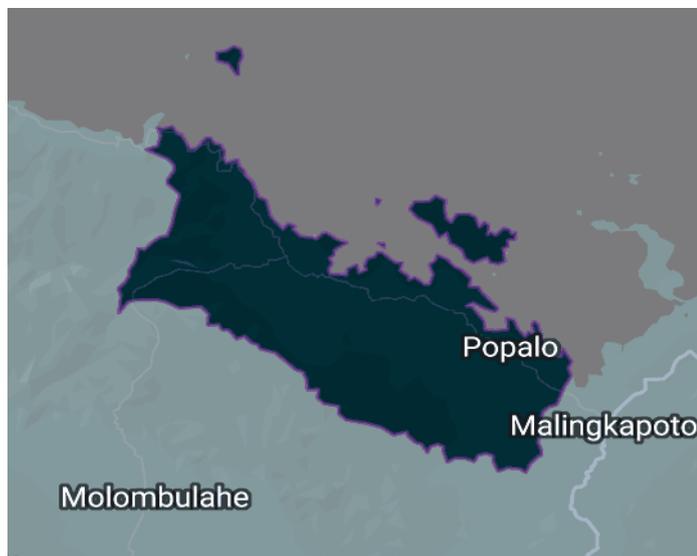
Merujuk pada hasil wawancara dan diskusi dengan masyarakat, oleh karena profesi sebagian besar masyarakat komunitas adat terpencil adalah sebagai petani, maka mereka berharap adanya ketersediaan lahan pertanian yang diperuntukkan bagi kepala keluarga yang belum memiliki lahan terutama petani penggarap. Ketersediaan lahan ini menjadi penting untuk keberlanjutan ekonomi mereka di lokasi pemukiman baru dan tentunya lahan pertanian yang diinginkan adalah lahan yang tidak bersengketa baik dengan perorangan maupun dengan tanah negara yang dilarang, sebab menurut masyarakat sebagian kawasan di lokasi pemukiman baru terdapat kawasan hutan industri milik negara. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya bantuan dari pemerintah terkait penyediaan peralatan pertanian yang memadai, pupuk, bibit, serta sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya misalnya tempat penjemuran jagung.

4.3.2 Desa Ibarat Kecamatan Anggrek

Kecamatan Anggrek adalah merupakan salah satu kecamatan di Kabupaten Gorontalo Utara yang berada di sebelah barat ibu kota Kabupaten Gorontalo Utara. Kecamatan Anggrek memiliki luas wilayah sebesar 141.507 KM² dan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terbesar ke 7 dari 11 kecamatan yang ada di Gorontalo Utara. Secara geografis, Kecamatan Anggrek terdiri dari pegunungan di sebelah selatan dan laut Sulawesi di sebelah utara. Umumnya penduduk Kecamatan Anggrek sebagian besar bekerja sebagai petani dan nelayan. Lahan pertanian masyarakat di Kecamatan Anggrek berada di wilayah perbukitan dan pegunungan.

Kecamatan Anggrek sebelah utara berbatasan langsung dengan Laut Sulawesi, sebelah timur berbatasan dengan Kecamatan Kwandang, sebelah selatan berbatasan dengan Kabupaten Gorontalo, dan sebelah barat berbatasan langsung dengan Kecamatan Monano. Kecamatan Anggrek terdiri dari 15 desa dan memiliki 68 dusun dan umumnya desa-desa di Kecamatan Anggrek adalah desa dengan kategori desa swadaya.

Jumlah penduduk di Kecamatan Anggrek pada tahun 2021 berjumlah 17.718 jiwa dan pada tahun 2022 berjumlah 18.040 jiwa atau sebesar 14.26% dari total jumlah penduduk Kabupaten Gorontalo Utara. Penduduk Kecamatan Anggrek termasuk penduduk terbanyak kedua setelah Kecamatan Kwandang dengan laju pertumbuhan penduduk 2.43% dengan tingkat kepadatan 127 jiwa per kilometer persegi. Keadaan transportasi yang merupakan penghubung antara Kecamatan Anggrek dengan Ibu Kota Kabupaten sangat memadai, demikian pula jalur transportasi penghubung antar desa juga sangat baik dan sangat memadai.



Gambar 3

PETA KECAMATAN ANGGREK

Desa Ibarat adalah salah satu desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara yang terbentuk berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 46 Tahun 2010 dan merupakan hasil pemekaran dari Desa Ilangata Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Desa Ibarat sendiri terdiri dari 7 dusun yang terbentang dari timur ke barat mengikuti garis pantai Laut Sulawesi.

Secara geografi, konsentrasi pemukiman penduduk di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek berada di sepanjang jalan Trans Sulawesi dan hanya sebagian kecil yang mendiami wilayah pesisir pantai di sebelah utara dan wilayah pertanian di sebelah selatan. Sedangkan secara geografis, jumlah penduduk Desa

Ibarat kecamatan Anggrek berjumlah 1.683 jiwa atau sebesar 9.44% dari total jumlah penduduk di Kecamatan Anggrek. Penduduk Desa Ibarat Kecamatan Anggrek termasuk penduduk dengan jumlah terbanyak ke 4 dari total 15 desa di Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara. Laju pertumbuhan penduduk di Desa Ibarat adalah sebesar 2.35% dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 125.21 per kilometer persegi. Sedangkan rasio jenis kelamin penduduk Desa Ibarat adalah sebanyak 108.2%.

Masyarakat Desa Ibarat cukup beragam baik etnik maupun agama. Merujuk pada data profil desa, terdapat sekitar 4 suku yang tinggal di Desa Ibarat diantaranya: Gorontalo, Minahasa, Sangir, dan Sasak. Dari keempat suku ini sebagian besar berasal dari suku Gorontalo. Sedangkan untuk agama yang dianut masyarakat, sebagian besar masyarakat Desa Ibarat beragama Islam dan sebagian kecilnya beragama Nasrani.

Penduduk Desa Ibarat Kecamatan Anggrek umumnya bekerja sebagai petani, dengan rincian, bekerja sebagai petani sebanyak 547 jiwa, bekerja sebagai nelayan 33 jiwa, bekerja sebagai tukang sebanyak 15 jiwa, dan bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil sebanyak 10 jiwa. Banyaknya penduduk yang bekerja sebagai petani dikarenakan terdapatnya lahan yang cukup luas di bagian selatan desa yang terbentang hingga perbatasan dengan Kabupaten Gorontalo. Sedangkan untuk keperluan air minum dan pengairan pertanian bersumber dari PDAM, sungai dan sumur. Untuk jelasnya tentang keadaan penduduk Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara dapat dilihat pada tabel 4.10 di bawah ini.

Tabel 4.10

KEADAAN PENDUDUK DESA IBARAT

INDIKATOR	TAHUN	
	2021	2022
Jumlah Penduduk	1.672	1.683
Kepadatan Penduduk	124.82	125.21
Laju Pertumbuhan	2.35	2.35
Rasio Jenis Kelamin	108.2	108.2

Sumber Data: Kecamatan Anggrek Dalam Angka 2022

Pada tahun 2022 jumlah penduduk Desa Ibarat mengalami kenaikan dari jumlah penduduk tahun 2021 sebanyak 1.672 Jiwa, menjadi 1.683 Jiwa pada tahun 2022. Komposisi penduduk Desa Ibarat yakni penduduk perempuan berjumlah 811 Jiwa dan penduduk laki-laki berjumlah 872 Jiwa. Sedangkan untuk jumlah Kepala Keluarga sebanyak 487 KK. Berdasarkan usia, jumlah penduduk Desa Ibarat yang berusia 0-15 tahun sebanyak 454 Jiwa, kemudian penduduk berusia 16-65 sebanyak 1.154 Jiwa, selanjutnya penduduk yang berusia 66 ke-atas sebanyak 75 Jiwa.

Jumlah penduduk usia produktif lebih besar dibanding dengan usia tidak produktif. Perhitungan usia produktif berdasarkan Badan Pusat Statistik (selanjutnya disingkat BPS) diukur pada rentang usia 15-65 Tahun, sedangkan usia tidak produktif diukur pada rentang usia 0-14 tahun dan usia 65 tahun ke atas. Jika merujuk pada perhitungan usia produktif berdasarkan BPS, maka diketahui bahwa jumlah usia produktif di Desa Ibarat lebih besar jumlahnya yakni 1.154 Jiwa dibandingkan dengan usia tidak produktif yang berjumlah 529 Jiwa. Pada tahun 2022, pemerintah melakukan pengusulan program Komunitas Adat Terpencil sebanyak 50 KK. Pemerintah telah melakukan proses seleksi bagi warga yang berhak mendapatkan bantuan program tersebut. Dan, prioritas utama pemerintah adalah warga yang kondisi ekonominya kurang mampu, terutama warga yang tidak memiliki tempat tinggal yang layak.

Masyarakat Komunitas Adat Terpencil Desa Ibarat sebagian besar merupakan masyarakat Gorontalo yang sudah tinggal dan menetap di Desa Ibarat. Sedangkan untuk agama yang dianut masyarakat Komunitas Adat Terpencil, mayoritas dari masyarakat tersebut beragama Islam. Setelah dikonfirmasi dalam wawancara dan diskusi kelompok, diketahui bahwa seluruh masyarakat Komunitas Adat Terpencil merupakan warga Desa Ibarat dibuktikan dengan adanya Kartu Tanda Penduduk (KTP).

Kedaaan ekonomi masyarakat Desa Ibarat termasuk dalam kategori masyarakat menengah ke bawah. Disamping itu, angka pengangguran di Desa Ibarat menurut data Profil Desa Ibarat masih cukup besar, yakni ada sekitar 314 penduduk dengan usia 18-56 tahun yang tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan

penduduk usia 18-56 tahun yang memiliki pekerjaan berjumlah 221 jiwa. Selain itu, ketersediaan tempat tinggal yang layak masih sangat kurang, sehingga beberapa masyarakat Desa Ibarat masih menumpang di rumah orang tua, mertua, dan saudara. Kondisi ini yang kemudian menjadi perhatian bersama dari pemerintah Desa Ibarat, dimana ketersediaan fasilitas khususnya tempat tinggal merupakan hal paling urgen untuk diprioritaskan. Sebab, kondisi tempat tinggal yang saat ini dimiliki masyarakat masih belum bisa dikatakan ideal karena dalam satu rumah terdapat 2-3 KK yang tinggal dan menetap di dalamnya.

Keadaan ekonomi masyarakat komunitas adat terpencil yang berjumlah 50 KK termasuk dalam kategori miskin. Disamping itu, masyarakat komunitas adat terpencil yang berjumlah 50 KK tersebut merupakan masyarakat yang belum memiliki tempat tinggal yang layak, sehingga dengan adanya program ini cukup membantu masyarakat yang berjumlah 50 KK tersebut. Sebagian besar dari masyarakat tersebut hanya menumpang di rumah orang tua, mertua, dan saudara. Selanjutnya, untuk mata pencaharian masyarakat komunitas adat terpencil yang berjumlah 50 KK sebagian besar berprofesi sebagai petani dengan komoditas pertanian yang ditanam adalah jagung. Perihal pendidikan, masyarakat komunitas adat terpencil memiliki rata-rata pendidikan yang cukup rendah yakni lulusan SD, SMP, dan SMA.

Pendapatan masyarakat komunitas adat terpencil berbeda-beda, sebab dari konteks pekerjaan saja sudah berbeda, dimana ada sebagian masyarakat bekerja sebagai petani pemilik lahan, ada juga yang bekerja sebagai petani penggarap. Rata-rata pendapatan para petani penggarap yakni Rp.1.000.000/bulan, sedangkan untuk petani pemilik rata-rata pendapatan berkisar Rp.1.000.000 – Rp. 2.000.000. Pendapatan petani penggarap maupun petani pemilik lahan tergantung pada alam, sebab jika cuaca bagus maka berdampak pada hasil produksi jagung mereka. Terkait pengelolaan lahan pertanian, masyarakat komunitas adat terpencil masih bergantung pada pola pengelolaan yang tradisional.

Perihal kondisi lokasi pemukiman baru komunitas adat terpencil Desa Ibarat perlu dilakukan konfirmasi dan pendalaman, sebab khusus di Desa Ibarat

terdapat dua calon lokasi untuk pemukiman Komunitas Adat Terpencil yakni di Dusun Diata 1 dan Dusun Lomuli. Kedua calon lokasi ini memiliki sisi positif dan negative yang perlu dilakukan konfirmasi lebih jauh ke pihak pemerintah dan disesuaikan dengan kondisi masyarakat setempat. Dalam diskusi dan wawancara bersama masyarakat, diketahui bahwa kedua calon lokasi tersebut memiliki kekurangan dan kelebihan. Misalnya untuk calon lokasi di Dusun Lomuli, beberapa kelebihannya adalah sebagian besar lahan pertanian warga Desa Ibarat khususnya para petani yang termasuk dalam 50 KK penerima program komunitas adat terpencil terletak di Dusun Lomuli, sehingga ketika Dusun Lomuli ditetapkan sebagai lokasi pemukiman komunitas adat terpencil akan lebih mempermudah para petani untuk mengelola lahannya karena berdekatan dengan pemukiman baru tersebut. Namun, kekurangan dari Dusun Lomuli adalah jarak dari pemukiman warga desa cukup jauh kurang lebih 5 km, jaringan telekomunikasi cukup sulit, ditambah lagi dengan akses jalan yang ketika hujan sulit untuk dilewati. Disamping itu, kendala paling berat juga yakni sarana dan prasarana pendidikan, kesehatan, dan lain-lain sulit untuk dijangkau dengan kondisi akses jalan yang tidak memadai.

Kondisi ini berbeda dengan Dusun Diata 1, dimana kelebihan dari lokasi ini yakni jarak dan akses jalan ke pemukiman warga desa cukup dekat kurang lebih hanya 1 km dan akses jalan cukup memadai. Kemudian jaringan telekomunikasi tersedia, dan yang paling penting lagi akses ke sarana dan prasarana seperti sekolah, fasilitas kesehatan, pasar, dan lain-lain sangat mudah dijangkau. Hanya saja kekurangannya adalah jarak Dusun Diata 1 ke lahan pertanian warga cukup jauh kurang lebih 3-5 km, sedangkan beberapa warga yang tinggal di Dusun Diata 1 memiliki lahan pertanian di Dusun Lomuli sehingga ketika Dusun Diata 1 ditetapkan menjadi lokasi pemukiman baru komunitas adat terpencil, maka sebagian besar warga pemukiman baru harus menempuh jarak sekitar 2-5 km ke lahan pertanian milik mereka. Alternatif yang bisa ditawarkan adalah pemerintah harus menyediakan lahan baru untuk setiap Kepala Keluarga di lokasi pemukiman baru khususnya di Dusun Diata 1.

Merujuk pada informasi yang didapatkan di lapangan, bahwa jumlah

unit rumah yang akan dibangun di lokasi pemukiman baru berjumlah 50 unit rumah yang akan ditempati oleh 50 KK miskin yang tidak memiliki rumah untuk tempat tinggal. Sampai saat ini belum ada informasi yang pasti terkait status tanah yang akan dijadikan lokasi pembangunan pemukiman baru. Perihal jenis dan type rumah, secara umum masyarakat komunitas adat terpencil menginginkan rumah yang layak huni, dan tentunya yang paling penting adalah ketersediaan air bersih, MCK, dan fasilitas lainnya yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.

Merujuk pada hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa ada dua calon lokasi yang ada di Desa Ibarat yakni Dusun Diata 1 dan Dusun Lomuli sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Khusus untuk jarak pemukiman baru komunitas adat terpencil Dusun Diata 1 dengan pemukiman desa kurang lebih jaraknya 1 km, sedangkan jika dihitung dari Dusun Lomuli kurang lebih berjarak sekitar 5 km. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai permasalahan yang akan timbul di kemudian hari sebagaimana yang telah terjadi di beberapa lokasi pemukiman komunitas adat terpencil di beberapa daerah di Gorontalo, dimana permasalahan yang timbul disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat komunitas adat terpencil untuk mengakses sarana dan prasarana sehingga membuat masyarakat komunitas adat terpencil meninggalkan pemukiman mereka dan kembali tinggal di lokasi asal mereka. Realitas ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan program tersebut. Jika bisa dipertimbangkan, maka alternatif lain yang perlu untuk dilakukan adalah sarana dan prasarana seperti Sekolah, Pustu, Masjid, Pasar, Air Bersih, dan sarana lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dibangun di lokasi pemukiman komunitas adat terpencil agar masyarakat terpenuhi semua kebutuhan sehari-hari mereka.

Pada konteks lain, selain sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk diakses, perlu juga dipertimbangkan jarak antara pemukiman komunitas adat terpencil dengan lahan pertanian masyarakat. Alternatif yang bisa diambil yakni bagi masyarakat yang jarak lokasi lahan

pertaniannya jauh dari pemukiman yang telah disediakan, maka perlu dilakukan pembukaan lahan baru agar masyarakat yang lahan pertaniannya jauh dari pemukiman tersebut dapat beraktivitas tanpa harus menempuh jarak yang berkilo-kilo meter. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat yang telah diwawancarai, rata-rata jarak lahan pertanian diantara kedua calon lokasi tersebut berbeda-beda sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

Merujuk pada informasi di lapangan, diketahui bahwa aspek lingkungan pada pemukiman komunitas adat terpencil cukup baik tidak rawan bencana, kebakaran, gempa, kejahatan, longsor, binatang buas, dan hal-hal lain yang membahayakan. Pada konteks aspek lingkungan dalam hal ini lingkungan masyarakat, kemudahan dalam melakukan kontak sosial juga menjadi harapan warga yang akan bermukim di pemukiman komunitas adat terpencil, sebab hubungan-hubungan kekerabatan maupun kekeluargaan tetap terjaga dengan baik meskipun masyarakat telah memiliki pemukiman baru. Masyarakat memiliki keinginan agar lokasi pemukiman baru tidak terlalu jauh dari pemukiman mereka sebelumnya, agar hubungan-hubungan sosial tetap terjaga. Selain kontak sosial secara langsung, masyarakat tentunya memiliki keinginan untuk tetap berkomunikasi lewat kontak jarak jauh dengan cara menggunakan alat komunikasi seperti *handphone*, maka dari itu harapan besar masyarakat untuk pengadaan jaringan telekomunikasi perlu menjadi perhatian pemerintah.

Merujuk pada hasil wawancara dan diskusi dengan masyarakat, oleh karena profesi sebagian besar masyarakat komunitas adat terpencil adalah sebagai petani, maka mereka berharap adanya ketersediaan lahan pertanian yang diperuntukkan bagi kepala keluarga yang belum memiliki lahan terutama petani penggarap. Ketersediaan lahan ini menjadi penting untuk keberlanjutan ekonomi mereka di lokasi pemukiman baru dan tentunya lahan pertanian yang diinginkan adalah lahan yang tidak bersengketa baik dengan perorangan maupun dengan tanah negara yang dilarang. Selain itu, masyarakat juga berharap adanya bantuan dari pemerintah terkait penyediaan peralatan pertanian yang memadai, pupuk, bibit, serta sarana dan prasarana produksi pertanian lainnya misalnya tempat penjemuran jagung dan lain sebagainya.

4.4 Analisis Hasil Kajian

4.4.1 Keadaan Ekonomi Komunitas Adat Terpencil

Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilaksanakan pemerintah dalam rangka untuk meningkatkan kesejahteraan komunitas adat melalui pendidikan, kesehatan, dan pengakuan identitas sebagai warga negara. Keterpencilan masih menjadi masalah yang dihadapi oleh komunitas adat dimana hal ini menyebabkan masih sulitnya dalam memperoleh akses pelayanan sosial baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sosial budaya. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bertujuan agar terentaskannya komunitas adat dari ketertinggalannya dengan masyarakat lainnya.

Pada dimensi keadaan ekonomi Komunitas adat terpencil terdapat 4 (empat) indikator yang di tanyakan kepada para responden terutama kepada masyarakat yang telah ditetapkan sebagai penerima program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yakni: ketersediaan lahan pertanian, keadaan pendidikan, keadaan pendapatan, dan kondisi tempat tinggal. Keempat indikator ini ditanyakan kepada seluruh responden yang berjumlah 116 orang penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, termasuk aparat Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan aparat Desa Ibarat Kecamatan Anggrek.

4.4.1.1 Ketersediaan Lahan Pertanian

Ketersediaan lahan pertanian menjadi salah satu indikator kelangsungan hidup para petani, karena dengan adanya lahan pertanian, maka petani dapat memenuhi kebutuhan keluarganya dan menjadi sumber pendapatan keluarga khususnya para petani. Di dua lokasi yang menjadi calon program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil, yakni Desa Tombulilato Kecamatan Anggrek dan Desa Ibarat Kecamatan Anggrek umumnya para calon penerima manfaat program tidak memiliki lahan pertanian. Mereka umumnya mengelola lahan pertanian di

lokasi yang bukan diperuntukkan untuk lahan pertanian, seperti membuka lahan pertanian di lereng bukit dan pegunungan. Ada juga sebagian dari mereka yang membantu mengelola lahan pertanian milik keluarga dan hanya beroleh pembagian hasil pendapatan dari lahan pertanian keluarga tersebut.

Terdapat tiga pertanyaan yang disampaikan kepada responden tentang ketersediaan lahan pertanian dalam keluarga yakni, ketersediaan lahan, kepemilikan lahan, dan pengelolaan lahan. Hal ini sebagaimana terlihat pada tabel 4.11 di bawah ini.

Tabel 4.11

**PERSENTASE HASIL SURVEY KETERSEDIAAN
LAHAN PERTANIAN**

Indikator	Ada	Tidak Ada	Bersama
Ketersediaan Lahan	17.50	47.50	35.00
Kepemilikan Lahan	3.50	63.67	32.83
Pengelolaan Lahan	6.67	11.66	81.67

Umumnya responden tidak memiliki lahan secara pribadi dan hanya mengelola lahan milik keluarga yang dikelola secara bersama, hal ini terlihat dari persentase hasil survey pada 3 indikator sumber bacaan. Pada indikator ketersediaan lahan, yang menyatakan ada sebanyak 17.50%, yang menyatakan tidak ada sebanyak 47.50 %, dan yang menyatakan milik bersama sebanyak 35.00%. Ini berarti bahwa ketersediaan lahan pertanian pada kelompok yang telah ditetapkan sebagai penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil umumnya tidak ada. Demikian pula dengan kepemilikan lahan, umumnya mereka menyatakan tidak memiliki lahan secara pribadi. Namun, mereka lebih banyak mengelola lahan milik bersama keluarga mereka dan mereka hanya memperoleh pendapatan yang kurang.

Sebagian kecil dari mereka memiliki lahan pertanian, namun kondisi lahan pertanian mereka selain kurang produktif, juga lahan tersebut tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan keluarga mereka. Oleh sebab itu mereka juga

dimasukkan sebagai penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil. Ada pula pemilik lahan pertanian, akan tetapi lahan pertanian tersebut sangat jauh dari lokasi tempat tinggal mereka.

4.4.1.2 Keadaan Pendidikan

Salah satu indikator berkembangnya suatu masyarakat ke arah yang lebih baik adalah keadaan pendidikan masyarakat. Masyarakat yang memiliki pendidikan yang cukup baik dapat terlihat pada tingkat kesejahteraan masyarakat tersebut. Pemerintah selalu berupaya untuk membangun sector pendidikan bagi masyarakat agar masyarakat kehidupannya menjadi lebih baik. Oleh sebab itu sector pendidikan sangat penting bagi pembangunan kesejahteraan masyarakat.

Salah satu aspek yang diupayakan pemerintah dalam program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil adalah memberikan layanan pendidikan yang baik bagi masyarakat khususnya bagi mereka yang tinggal di daerah terpencil, di daerah pelosok dan bahkan di daerah terluar terjauh. Telah banyak program pemberdayaan yang dilaksanakan pemerintah khususnya di sector pendidikan, hal ini dikarenakan pemerintah berupaya membangun manusia Indonesia menjadi manusia yang lebih baik dan tidak kalah bersaing dengan negara-negara lainnya.

Namun demikian, masih banyak kendala yang dihadapi oleh pemerintah dalam membangun sector pendidikan. Hal ini terlihat dari masih banyaknya masyarakat Indonesia termasuk yang penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil yang masih memiliki status pendidikan yang rendah. Hal ini juga terlihat pada masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Sebagai salah satu indikator dari variable keadaan ekonomi Komunitas Adat Terpencil di kabupaten Gorontalo Utara, keadaan pendidikan penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil umumnya masih rendah. Hal ini sebagaimana digambarkan pada table 4.12 di bawah ini

Tabel 4.12

**PERSENTASE HASIL SURVEY KEADAAN PENDIDIKAN
RESPONDEN**

Indikator	Jumlah
Tidak Sekolah	0
Tamat SD	16
Tamat SMP / Sederajat	39
Tamat SMA / Sederajat	45
Tamat Perguruan Tinggi	0

Berdasarkan tabel 4.12 tentang keadaan pendidikan responden di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa sebagian besar calon penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat terpencil di kedua desa tersebut memiliki status pendidikan yang cukup baik, yakni sebanyak 45 orang tamatan SMA atau sederajat, 39 orang tamatan SMP, dan hanya 16 orang tamatan SD. Sedangkan yang tamatan perguruan tinggi tidak ada.

Cukup baiknya kondisi pendidikan yang dimiliki oleh calon penerima manfaat program Komunitas Adat Terpencil di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek, hal ini menandakan bahwa yang membuat mereka menjadi calon peserta pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil bukan karena faktor pendidikan, akan tetapi karena kurangnya ketersediaan lahan pertanian sehingga dengan terpaksa mereka membuka lahan pertanian di tempat-tempat yang dilarang oleh pihak pemerintah seperti di perbukitan dan pegunungan. Juga, sebagian besar dari mereka masih menggarap lahan bersama milik keluarga sehingga keadaan ekonomi mereka tidak berkembang dengan baik. Walaupun ada beberapa diantara mereka yang hanya lulusan SD atau sederajat, akan tetapi masalah utama yang mereka hadapi adalah kurangnya ketersediaan lahan milik mereka dan hanya berhadap dari program pemberdayaan masyarakat yang diberikan oleh pemerintah, dalam hal ini Pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara.

4.4.1.3 Keadaan Pendapatan

Umumnya calon penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tidak memiliki lahan sebagaimana telah digambarkan pada sub pembahasan kepemilikan lahan pertanian, maka secara tidak langsung keadaan pendapatan penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara juga berada di bawah standar. Umumnya mereka masih bergantung hidup dari lahan pertanian yang mereka buka di lereng bukit dan pegunungan yang jauh dari pemukiman penduduk, dan juga sebagian dari mereka masih membantu mengolah lahan pertanian milik bersama keluarga.

Ada pula yang harus dengan keadaan terpaksa tinggal jauh di atas pegunungan demi menjaga hasil perkebunan mereka agar tidak dirusak oleh binatang liar. Karena jauhnya jarak yang mereka harus tempuh, juga berdampak pada hasil pendapatan mereka, karena harus membawa hasil perkebunan mereka dari tempat yang cukup jauh untuk di jual di pasar pasar di sekitar desa mereka. Untuk jelasnya keadaan pendapatan calon penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil dapat dilihat pada tabel 4.13 di bawah.

Tabel 4.13

PERSENTASE HASIL SURVEY KEADAANPENDAPATAN RESPONDEN

Indikator	Baik	Kurang Baik	TidakAda
Sumber Pendapatan	1.31	20.78	77.91
Keadaan Pendapatan	1.82	31.06	67.12

Berdasarkan data tabel 4.13 di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa keadaan pendapatan responden terhitung kurang baik dan bahkan tidak ada sama sekali. Yang menjawab tidak ada, berdasarkan hasil wawancara dengan responden

adalah mereka yang bergantung pada lahan milik bersama keluarga dan di nikmati bersama-sama dengan anggota keluarga lainnya. Sedangkan mereka yang menjawab kurang baik adalah mereka yang membukan lahan pertanian jauh dari pemukiman penduduk berada di lereng bukit dan pegunungan. Sedangkan mereka yang menjawab baik adalah mereka yang memiliki lahan pertanian tetapi masih belum mencukupi untuk kebutuhn keluarganya dan umumnya walaupun jauh dari pemukiman tetapi masih bisa dijangkau oleh mereka.

4.4.1.3 Keadaan Tempat Tinggal

Memiliki tempat tinggal adalah impian setiap keluarga, terutama keluarga baru agar mereka dapat hidup dengan layak dan dapat membangun rumah tangga mereka dengan baik. Umumnya calon penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil tidak memiliki tempat tinggal sendiri dengan status kepemilikan sendiri. Sebagian besar mereka tinggal dan membangun rumah sederhana dan bahkan tidak layak huni dan berada di area perkebunan mereka yang berada di perbukitan dan pegunungan. Mereka membangun rumah tidak layak huni tersebut hanya dalam upaya mereka untuk menjaga kebun mereka agar tidak diganggu oleh binatang liar.

Sebagian dari mereka juga tinggal bersama keluarga mereka, namun tidak setiap hari karena mereka harus mengunjungi kebun mereka yang jauh dari pemukiman. Selain itu, ada pula diantara mereka yang tinggal bersama keluarga mereka dan juga mengelola kebun milik keluarga. Keadaan ini dialami oleh calon penerima program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

Banyaknya masyarakat yang membuka lahan baru dan membangun rumah tidak layak huni di area perkebunan mereka yang jauh dari pemukiman warga, telah menyebabkan perusakan lingkungan di sekitar perbukitan dan pegunungan. Terutama di Desa Tombulilato yang sebelah timur desa terdapat hutan lebat yang tentunya selalu dijaga oleh pemerintah agat terjaga kelestarian hutan. Untuk lebih jelasnya tentang keadaan tempat tinggal calon penerima

manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di kedua desa tersebut dapat dilihat pada tabel 4.14 di bawah.

Tabel 4.14

**PERSENTASE HASIL SURVEY KEADAAN TEMPAT TINGGAL
RESPONDEN**

Indikator	Ada	Ada (Kurang Layak)	TidakAda
Memiliki Tempat Tinggal	2.31	76.91	20.78
Memiliki Rumah Sendiri	3.42	31.06	65.52
Tinggal Bersama Keluarga	12.50	41.50	46.00

Berdasarkan data tabel 4.14 di atas, maka terlihat dengan jelas bahwa keadaan tempat tinggal respon di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, umumnya mereka belum memiliki tempat tinggal yang layak dan bahkan banyak yang tidak memiliki tempat tinggal atau tinggal bersama keluarga. Keadaan tempat tinggal yang kurang layak cukup banyak karena rumah tersebut di bangun di area perkebunan mereka sendiri dan jauh dari pemukiman. Sedangkan yang memiliki rumah sendiri adalah mereka yang memiliki rumah namun sangat jauh dari area perkebunan mereka sehingga rumah tersebut sering mereka tinggalkan dalam keadaan kosong tanpa penghuni dan mereka lebih banyak tinggal di rumah tidak layak huni di perkebunan mereka sendiri.

4.4.2 Keadaan Lokasi Komunitas Adat Terpencil

Untuk lokasi di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola Kabupaten Gorontalo Utara, merujuk pada hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa jarak pemukiman baru komunitas adat terpencil dengan pemukiman desa sejauh 1 km. Jarak ini tidak menjadi permasalahan bagi masyarakat komunitas adat terpencil, hanya saja permintaan masyarakat adalah akses jalan dari pemukiman baru menuju pemukiman penduduk desa perlu diperbaiki agar layak dan memudahkan akses masyarakat dalam beraktivitas,

terutama dalam mengakses pasar, sarana pendidikan, sarana kesehatan, dan sarana prasarana lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat komunitas adat terpencil.

Hal ini menjadi perhatian penting untuk menghindari permasalahan-permasalahan yang seringkali terjadi di beberapa lokasi komunitas adat terpencil, dimana permasalahan yang timbul disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat komunitas adat terpencil untuk mengakses sarana dan prasarana sehingga membuat masyarakat komunitas adat terpencil meninggalkan pemukiman mereka dan kembali tinggal di lokasi asal mereka. Realitas ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan program tersebut. Jika bisa dipertimbangkan, maka alternatif lain yang perlu untuk dilakukan adalah sarana dan prasarana seperti Sekolah, Pustu, Masjid, Pasar, Air Bersih, dan sarana lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dibangun di lokasi pemukiman komunitas adat terpencil agar masyarakat terpenuhi semua kebutuhan sehari-hari mereka.

Pada konteks lain, selain sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk diakses, perlu juga dipertimbangkan jarak antara pemukiman komunitas adat terpencil dengan lahan pertanian masyarakat. Alternatif yang bisa diambil yakni bagi masyarakat yang jarak lokasi lahan pertaniannya jauh dari pemukiman yang telah disediakan, maka perlu dilakukan pembukaan lahan baru agar masyarakat yang lahan pertaniannya jauh dari pemukiman tersebut dapat beraktivitas tanpa harus menempuh jarak yang berkilo-kilo meter. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat yang telah diwawancarai, rata-rata jarak lahan pertanian mereka berjarak 500 meter hingga 1 km dari pemukiman komunitas adat terpencil. Hanya ada beberapa orang yang jarak lahan pertaniannya sejauh 2 km sampai 7 km. Kondisi ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah agar menyiapkan alternatif dalam mengatasi permasalahan tersebut.

Sedangkan di lokasi di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara, merujuk pada hasil diskusi dan wawancara dengan masyarakat, diketahui bahwa ada dua calon lokasi yang ada di Desa Ibarat yakni Dusun Diata

1 dan Dusun Lomuli sebagaimana yang telah diuraikan pada pembahasan sebelumnya. Khusus untuk jarak pemukiman baru komunitas adat terpencil Dusun Diata 1 dengan pemukiman desa kurang lebih jaraknya 1 km, sedangkan jika dihitung dari Dusun Lomuli kurang lebih berjarak sekitar 5 km. Pemerintah perlu memperhatikan berbagai permasalahan yang akan timbul di kemudian hari sebagaimana yang telah terjadi di beberapa lokasi pemukiman komunitas adat terpencil di beberapa daerah di Gorontalo, dimana permasalahan yang timbul disebabkan oleh ketidakmampuan masyarakat komunitas adat terpencil untuk mengakses sarana dan prasarana sehingga membuat masyarakat komunitas adat terpencil meninggalkan pemukiman mereka dan kembali tinggal di lokasi asal mereka. Realitas ini perlu menjadi perhatian khusus dari pemerintah untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan terkait dengan program tersebut. Jika bisa dipertimbangkan, maka alternatif lain yang perlu untuk dilakukan adalah sarana dan prasarana seperti Sekolah, Pustu, Masjid, Pasar, Air Bersih, dan sarana lainnya yang menjadi kebutuhan masyarakat harus dibangun di lokasi pemukiman komunitas adat terpencil agar masyarakat terpenuhi semua kebutuhan sehari-hari mereka.

Pada konteks lain, selain sarana dan prasarana umum yang menjadi kebutuhan masyarakat untuk diakses, perlu juga dipertimbangkan jarak antara pemukiman komunitas adat terpencil dengan lahan pertanian masyarakat. Alternatif yang bisa diambil yakni bagi masyarakat yang jarak lokasi lahan pertaniannya jauh dari pemukiman yang telah disediakan, maka perlu dilakukan pembukaan lahan baru agar masyarakat yang lahan pertaniannya jauh dari pemukiman tersebut dapat beraktivitas tanpa harus menempuh jarak yang berkilo-kilo meter. Sampai saat ini, sebagian besar masyarakat yang telah diwawancarai, rata-rata jarak lahan pertanian diantara kedua calon lokasi tersebut berbeda-beda sebagaimana telah disebutkan sebelumnya.

4.4.3 Potensi Ekonomi Desa yang dapat dikembangkan untuk Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan KAT menurut Peraturan Menteri Sosial nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014 adalah serangkaian kebijakan, strategi, program dan kegiatan yang diarahkan pada upaya pemberian kewenangan dan kepercayaan kepada KAT setempat untuk menemukan masalah dan kebutuhan beserta upaya pemecahannya berdasarkan kekuatan dan kemampuan sendiri, melalui upaya perlindungan, penguatan, pengembangan, konsultasi dan advokasi guna peningkatan taraf kesejahteraan sosialnya. Disamping itu Pemberdayaan sendiri dapat dimaknai sebagai upaya dalam memberikan kekuatan kepada masyarakat agar mampu mendapatkan akses sumberdaya dan mengembangkan secara mandiri demi meningkatkan ekonomi keluarga.

Pemberdayaan terbagi dalam dua bentuk, antara lain pemberdayaan dalam bentuk fisik dan pemberdayaan dalam bentuk non-fisik. Pemberdayaan dalam bentuk fisik berupa pembangunan infrastruktur rumah layak huni, pembangunan sarana dan prasarana baik pendidikan, kesehatan, dan sarana air bersih, MCK, pembangunan infrastruktur jalan dan balai sosial, serta pemberian lahan pertanian dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan dalam bentuk non fisik dapat berupa pengembangan skill dan inovasi masyarakat dalam memnfaatkan sumberdaya alam yang tersedia menjadi bernilai ekonomi tanpa merusak. Pemberdayaan ini dapat diimplementasikan melalui pengembangan kelompok usaha tani, pengembangan kelompok usaha industry rumah tangga, serta usaha lainnya yang dapat dikembangkan melalui potensi sumberdaya alam yang tersedia.

Sejalan dengan penjelasan di atas, untuk mendorong keberlanjutan ekonomi masyarakat calon penerima program KAT di Desa Tombulilato, pemerintah perlu melakukan pendampingan dan penguatan kapasitas masyarakat dalam mengembangkan potensi sumberdaya Desa Tombulilato agar dapat dimanfaatkan masyarakat sebagai upaya dalam mendorong peningkatan ekonomi keluarga. Beberapa hal yang bisa dikembangkan di Desa Tombulilato melalui agenda pemberdayaan diantaranya inovasi dalam pembuatan limbah rumah tangga, limbah

pertanian, dan limbah produktif lainnya untuk dijadikan pupuk. Inovasi ini telah aplikasikan masyarakat Desa Tombulilato, hanya saja perlu dilakukan pendampingan dan penguatan agar dapat dikembangkan lebih baik lagi, sehingga dapat menghasilkan nilai ekonomi dan berdampak pada peningkatan ekonomi masyarakat.

Selain Limbah yang dapat dijadikan pupuk, potensi sumberdaya yang ada di Desa Tombulilato juga terdapat pada pengembangan industri rumah tangga dengan komoditas unggulannya adalah Gula Aren Atinggola. Gula Aren yang diproduksi di Desa Tombulilato cukup terkenal di Propinsi Gorontalo, dimana kualitas Gula Aren Desa Tombulilato memiliki ciri khas tersendiri, hanya saja permasalahannya adalah pada proses pengembangan dan perluasan pasar, dimana perlu adanya pendampingan dari Pemerintah Daerah untuk memberikan semacam penyuluhan dan pelatihan terkait dengan proses produksi hingga pemasaran. Oleh karena tidak adanya skill masyarakat dalam pengembangan industri rumah tangga di Desa Tombulilato, sehingga berdampak pada tidak terbukanya pasar secara luas dalam pemasaran Gula Aren Desa Tombulilato.

Merujuk hasil wawancara dengan Kepala Desa Tombulilato selain memiliki potensi pengembangan Gula Aren, juga desa ini memiliki potensi air bersih yang bagus untuk dikembangkan menjadi air kemasan semacam Aqua, Ake, dan air kemasan lainnya. Hal ini dibuktikan dengan prestasi yang pernah diraih Desa Tombulilato dalam acara lomba PAMSIMAS dimana Desa Tombulilato mendapatkan peringkat ke-4 dari ratusan peserta PAMSIMAS di Propinsi Gorontalo. Setelah diuji, ternyata air minum yang ada di Desa Tombulilato memiliki PH 8 dimana air minum dengan PH 8 dinilai mampu memberikan manfaat bagi tubuh. Normalnya, PH air minum yang netral itu berada pada angka 7, sedangkan untuk Desa Tombulilato berada pada angka PH 8, sehingga hal demikian mengindikasikan bahwa air minum dengan PH 8 cukup baik untuk tubuh. Meskipun demikian, perlu adanya pengecekan yang lebih spesifik di laboratorium, dimana Pemerintah Daerah perlu untuk melakukan pendampingan untuk pengembangan potensi air minum di Desa Tombulilato. Jika benar adanya setelah diuji dari Laboratorium terkait potensi air minum di Desa Tombulilato, maka dapat penting kiranya untuk mengembangkan potensi air minum di Desa Tombulilato menjadi air minum kemasan yang juga bernilai ekonomi.

Penting sekali adanya kerjasama antar dinas di Kabupaten Gorontalo Utara dalam mengembangkan potensi sumberdaya yang ada di Desa Tombulilato. Hal ini dapat dijadikan sebagai upaya pemerintah Kabupaten Gorontalo Utara yang berkerjasama dengan masyarakat Desa Tombulilato khususnya Komunitas Adat Terpencil untuk mendorong agenda-agenda pemberdayaan demi meningkatkan ekonomi masyarakat melalui pengembangan sumberdaya alam yang tersedia dan kaya di Desa Tombulilato. Disamping itu, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga perlu didorong untuk memfasilitasi masyarakat dalam menopang ekonomi lokal di Desa Tombulilato, dimana unit-unit usaha BUMDes perlu didorong pada pengembangan sektor-sektor yang memiliki potensi ekonomi. BUMDes harus menjadi garda terdepan dalam pengembangan potensi ekonomi lokal, agar masyarakat desa tidak kesulitan dalam memikirkan modal usaha. BUMDes juga dapat memotong mata rantai ketergantungan masyarakat terhadap “tengkulak” di desa, sebab kesulitan dalam memperoleh modal usaha dapat difasilitasi oleh BUMDes.

Hal yang sama juga untuk Desa Ibarat, dimana Desa Ibarat juga memiliki potensi di sektor pertanian. Sebagian besar masyarakat Desa Ibarat berprofesi sebagai petani jagung, ada juga sebagian yang mengembangkan ekonomi industri rumah tangga seperti Gula Aren. Potensi ekonomi ini perlu dikembangkan melalui kerjasama pemerintah daerah dan masyarakat penerima bantuan Komunitas Adat Terpencil. Terkait potensi Gula Aren di Desa Ibarat, meskipun tidak setenar kualitas dan nama dari Gula Aren di Desa Tombulilato, namun Gula Aren di Desa Ibarat perlu untuk dikembangkan agar dapat dipasarkan secara luas. Pemerintah daerah dan pemerintah desa perlu mendorong aktivitas produksi Gula Aren di Desa Ibarat agar dapat bersaing dengan kualitas Gula Aren dari beberapa daerah.

Merujuk pada laporan akhir KKS Pengabdian masyarakat Universitas Negeri Gorontalo yang dilakukan pada tahun 2015, diketahui bahwa sebagian besar masyarakat Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara merupakan pembuat gula aren. Pohon aren atau enau (*Arenga pinnata Merr*) merupakan tumbuhan yang menghasilkan bahan-bahan industri sejak lama kita kenal. Namun sayang tumbuhan ini kurang mendapat perhatian untuk dikembangkan atau dibudidayakan secara sungguh-sungguh oleh masyarakat. Begitu banyak ragam produk yang dipasarkan setiap hari yang berasal dari bahan

baku pohon aren dan permintaan produk-produk tersebut baik untuk kebutuhan ekspor maupun kebutuhan dalam negeri semakin meningkat. Hampir semua bagian pohon aren bermanfaat dan dapat digunakan untuk berbagai kebutuhan, mulai dari bagian fisik (akar, batang, daun, ijuk dll) maupun hasil produksinya (nira, pati/tepung dan buah). Selama ini permintaan produk-produk yang bahan bakunya dari pohon aren masih dipenuhi dengan mengandalkan pohon aren yang tumbuh liar. Di samping itu, perambahan hutan dan konversi kawasan hutan alam untuk penggunaan lain juga mempercepat penurunan populasi pohon aren.

Selain Gula Aren, potensi yang ada di sektor pertanian khususnya komoditas jagung juga perlu dikembangkan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek mengingat begitu luasnya lahan pertanian masyarakat di Desa Ibarat seyogianya dapat memberikan dampak ekonomi kepada masyarakat desa. Sebagaimana telah dijelaskan pada uraian sebelumnya tentang BUMDes, pemerintah Desa Ibarat perlu mendorong agar BUMDes dapat mengelola unit usaha yang berhubungan dengan sektor pertanian. BUMDes dapat memfokuskan program pemberdayaan dalam bentuk penyediaan sarana produksi pertanian yang dikelola melalui unit usahanya. Selama ini banyak BUMDes di Indonesia khususnya di Gorontalo, hanya fokus pada unit usaha jasa seperti jasa peminjaman kursi, tenda, dan juga jasa bengkel yang seyogianya tidak memiliki hubungan erat dengan sektor pertanian.

Pada konteks ini, *mainstream* BUMDes perlu didorong ke arah yang lebih produktif dan berhubungan langsung dengan kondisi ekonomi masyarakat dan potensi sumberdaya yang ada di Desa Ibarat. Jika diidentifikasi lebih jauh, potensi ekonomi di Desa Ibarat lebih besar pada sektor pertanian dan industri rumah tangga, sehingga seyogianya unit usaha BUMDes didorong pada aktivitas ekonomi di sektor pertanian. Permasalahan petani terkait pupuk, bibit, obat-obatan tanaman, dan lain-lain penting untuk dimediasi oleh BUMDes agar menghindari adanya obsesi petani untuk meminjam modal ke tengkulak. BUMDes harus hadir dalam meminimalisir permasalahan tersebut dengan cara menyediakan kebutuhan-kebutuhan petani agar petani dapat menerima manfaat dari adanya program pemberdayaan yang dikelola oleh BUMDes. Tidak hanya pada sektor

pertanian, namun BUMDes juga perlu juga terlibat dalam meminimalisir permasalahan yang dialami oleh Usaha-usaha kecil yang ada di Desa Ibarat, dimana BUMDes memiliki peran dalam mengembangkan modal usaha dan memediasi usaha-usaha kecil tersebut agar mendapatkan pasar baik di dalam maupun di luar desa.

BUMDes harus lebih proaktif dalam melakukan pendampingan terhadap usaha-usaha mikro di desa terutama dari segi pengembangan, peminjaman modal, dan pemasaran. Masyarakat harus diajak untuk terlibat dalam pengembangan ekonomi desa, terutama dalam hal pengawalan program-program pemberdayaan. Sebagai Badan Usaha, BUMDes harus mampu menjadi tonggak perekonomian masyarakat di Desa Ibarat. Disamping itu, BUMDes perlu dikelola oleh orang-orang yang memiliki visi ekonomi kreatif, agar dana-dana yang dimiliki oleh BUMDes dapat digunakan dalam mendorong peningkatan usaha-usaha kreatif di desa dan tentunya berdasarkan potensi sumberdaya yang ada di Desa Ibarat.

Sejauh ini, kendala yang seringkali dialami masyarakat adalah ketidakmampuan mereka dalam mengembangkan sumberdaya ekonomi yang tersedia secara mandiri, sehingga banyak masyarakat yang membutuhkan pendampingan dari pemerintah, terutama dalam hal pelibatan mereka dalam proses pembangunan ekonomi di desa. Dengan potensi sektor pertanian yang cukup besar di Desa Ibarat, dan adanya pelibatan masyarakat dalam setiap proses pembangunan dan pemberdayaan, maka dapat dipastikan masyarakat akan lebih mampu untuk mandiri dalam peningkatan ekonomi keluarga, sehingga hal ini juga akan membantu pemerintah dalam menurunkan angka kemiskinan di Desa Ibarat.

Masyarakat Desa Tombulilato dan Desa Ibarat khususnya masyarakat miskin calon penerima bantuan program Komunitas Adat Terpencil perlu didorong kemandiriannya dalam memanfaatkan potensi ekonomi lokal, agar proyeksi ke depan terkait agenda pemberdayaan dapat memberikan dampak dan manfaat positif dalam keberlanjutan ekonomi masyarakat penerima bantuan program Komunitas Adat Terpencil. Masyarakat harus menjadi subjek dari agenda pembangunan, bukan dijadikan objek dari proyek-proyek pembangunan. Pada konteks inilah pembangunan partisipatif perlu dilakukan dimana masyarakat harus dilibatkan dalam pengambilan

kebijakan dan penentuan arah pembangunan ke depan. Realitas yang seringkali terjadi di Indonesia, dimana masyarakat hanya menjadi objek pembangunan, sedangkan agenda pembangunan hanya dirumuskan dan ditentukan oleh aktor-aktor yang seyogianya kebijakan tersebut hanya menguntungkan segelintir orang saja. Pada konteks ini, kita dapat melihat dengan seksama, dimana agenda-agenda pembangunan wilayah pedesaan masih sangat jauh dengan apa yang diharapkan.

Pembangunan partisipatif merupakan suatu upaya dalam mendekonstruksi pembangunan yang bersifat *top-down* yang selama ini masih menjadi mainstream dalam berbagai agenda pembangunan di wilayah pedesaan. Dampak dari pembangunan yang sifatnya *top-down* adalah dimana wilayah pedesaan menjadi kantong-kantong kemiskinan, bahkan realitas yang terjadi saat ini yakni fenomena kemiskinan masih merupakan fenomena di pedesaan, padahal sumberdaya alam dan potensi ekonomi yang cukup besar adanya di wilayah pedesaan, lantas kenapa kemiskinan masih bertumpuk di desa-desa. Hal inilah yang kemudian menjadi ironi dalam wajah pembangunan pedesaan di Indonesia. Maka dari itu, mainstream pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di wilayah pedesaan harus didekonstruksi dari pembangunan yang bersifat *top-down* menjadi *bottom-up*. Masyarakat harus menjadi subjek pembangunan dimana mulai dari proses perencanaan hingga evaluasi harus melibatkan masyarakat lokal terutama masyarakat penerima bantuan program Komunitas Adat Terpencil.

Pada konteks di atas, dapat dipastikan agenda-agenda pemberdayaan masyarakat khususnya masyarakat penerima bantuan program Komunitas Adat Terpencil akan lebih terarah dan mandiri. Sebab, substansi pemberdayaan dapat memungkinkan adanya proses pemberian kemampuan kepada masyarakat dalam mengelola sumberdaya alam menjadi bernilai ekonomi yang kemudian dapat menjadikan masyarakat memiliki “keberdayaan” dalam mengelola ekonominya secara mandiri.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal terkait kajian komunitas adat terpencil di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan Desa Ibarat Kecamatan Anggrek, diantaranya sebagai berikut:

1. Permasalahan yang dialami oleh KAT di Desa Ibarat Kec. Anggrek dan Desa Tombulilato Kec. Atinggola cukup kompleks, dimana masalah dari kedua desa tersebut sangat erat kaitannya dengan masalah keterpencilan yang menyebabkan masih sulitnya dalam memperoleh akses pelayanan sosial baik pendidikan, kesehatan, ekonomi, maupun sumberdaya. Program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil menjadi penting untuk memberikan kemampuan kepada masyarakat komunitas adat terpencil agar mampu mengelola ekonominya secara mandiri melalui potensi sumberdaya alam yang tersedia.
2. Kepemilikan lahan pertanian oleh masyarakat penerima program KAT di kedua desa masih sangat minim, dimana sebagian besar masyarakat penerima program KAT tersebut tidak memiliki lahan pertanian, sehingga ketersediaan lahan pertanian juga dianggap penting, sebab hal tersebut merupakan salah satu indikator kelangsungan hidup para petani, dimana lahan pertanian menjadi alat produksi ekonomi para petani untuk kelangsungan ekonomi rumah tangga mereka.
3. Selain kepemilikan lahan, permasalahan yang terjadi di lapangan juga adalah masih rendahnya tingkat pendidikan, dimana hal ini juga terlihat pada masyarakat penerima manfaat program pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil di Desa Tombulilato Kecamatan Atinggola dan di Desa Ibarat Kecamatan Anggrek Kabupaten Gorontalo Utara.

4. Pentingnya program KAT untuk kedua desa ini karena hasil di lapangan menunjukkan bahwa keadaan ekonomi masyarakat Desa Ibarat termasuk dalam kategori masyarakat menengah ke bawah. Disamping itu, angka pengangguran di Desa Ibarat menurut data Profil Desa Ibarat masih cukup besar, yakni ada sekitar 314 penduduk dengan usia 18-56 tahun yang tidak memiliki pekerjaan. Sedangkan penduduk usia 18-56 tahun yang memiliki pekerjaan berjumlah 221 jiwa. Selain itu, ketersediaan tempat tinggal yang layak masih sangat kurang, sehingga beberapa masyarakat Desa Ibarat masih menumpang di rumah orang tua, mertua, dan saudara.
5. Kedua desa yang menjadi fokus kajian memiliki potensi ekonomi yang sangat penting untuk dikembangkan, sebagai upaya dari pemberian kemampuan terhadap masyarakat dalam mengelola ekonominya secara mandiri. Jika potensi ini dapat dikembangkan dengan baik, maka akan berdampak positif terhadap perekonomian masyarakat dari kedua lokasi yang menjadi fokus kajian tersebut.

5.2 Saran dan Rekomendasi

Merujuk pada hasil penelitian di lapangan, ada beberapa saran yang perlu diperhatikan oleh pemerintah, diantaranya:

1. Dengan minimnya kepemilikan lahan oleh masyarakat penerima manfaat program KAT, maka diharapkan pemerintah bisa menyediakan lahan pertanian untuk masyarakat khususnya yang belum memiliki lahan pertanian, agar keberlangsungan ekonomi masyarakat dapat berlangsung dengan baik.
2. Ketersedian sarana dan prasarana pendidikan di lokasi pemukiman baru juga menjadi sangat penting untuk dibangun, sebab sarana dan prasarana pendidikan dapat menunjang peningkatan status pendidikan masyarakat di pemukiman baru.
3. Selain sarana dan prasarana pendidikan, sarana dan prasarana kesehatan juga menjadi bagian paling penting dalam masyarakat, mengingat jarak antara sarana dan prasarana di desa cukup jauh dari pemukiman baru,

maka diharapkan pemerintah dapat membangun sarana dan prasarana kesehatan di lokasi pemukiman baru.

4. Pemerintah juga diharapkan untuk menyediakan sarana produksi pertanian di lokasi pemukiman baru untuk menunjang aktivitas pertanian dari masyarakat penerima manfaat, terutama pupuk, bibit, obata-obatan pertanian, serta fasilitas tempat penjemuran jagung untuk penunjang pertanian masyarakat.
5. Diharapkan juga agar dilakukan pelatihan dan penyuluhan terkait pemanfaatan limbah pertanian untuk dimanfaatkan menjadi pupuk, agar limbah pertanian tidak menjadi sampah yang merusak lingkungan pemukiman baru. Kegiatan ini sebagai upaya dalam mendorong kemampuan masyarakat untuk berinovasi terutama di sektor pertanian.
6. Untuk pemerintah desa, khususnya kedua desa penerima manfaat KAT diharapkan agar dapat menyiapkan program pemberdayaan masyarakat melalui program-program BUMDes. Hal ini merupakan upaya dari pemerintah desa untuk menjaga keberlangsungan ekonomi masyarakat penerima manfaat.

DAFTAR PUSTAKA

REFERENSI JURNAL DAN BUKU

- Creswell, J. W. (2009). *Research Design Pendekatan Kualitatif, Kuantitatif dan Mixed*. (A. Fawaid, Trans.) Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Dove, M. R. (1985). *Peranan Kebudayaan Tradisional Indonesia Dalam Modernisasi*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia.
- Fadhilah, A., & Yatim, A. (2009). *Kearifan Lokal Sebagai Modal Sosial Ketahanan Pangan Masyarakat: Studi Kasus pada Masyarakat Jp. Cireundeu Kelurahan Leuwi Gajah Kecamatan Cimahi Selatan, Desa Molamahu Kecamatan Pulubala Kabupaten Gorontalo, Komunitas Baduy (Laporan penelitian 2009)*. Jakarta : UIN Syarif Hidayatullah .
- Hatu, R. (2017). *Hasil Studi Kelayakan Komunitas Adat Terpencil*. Gorontalo: Dinas Sosial Provinsi Gorontalo.
- Idrus, M. (2009). *Penelitian Ilmu Sosial Pendekatan Kualitatif dan Kuantitatif*. Yogyakarta: Erlangga.
- Moleong, L. (2005). *Metode-Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Rosdakarya.
- Nurwati, N. (2008). *Kemiskinan : Model Pengukuran, Permasalahan dan Alternatif Kebijakan*. *Jurnal Kependudukan Padjadjaran*, 10(1), 245387
- Kartasasmita, G. (1996). *Pembangunan Untuk Rakyat, Memadukan Pertumbuhan dan Pemerataan*; PT. Pustaka CIDESINDO, Jakarta.
- K.Yin, R. (2008). *Studi kasus desain dan metode*. (M. Mudzakir, Trans.) Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Ratna, N. K. (2013). *Paradigma Sosiologi Sastra*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Sardlow, S. (1998). "Values Ethics and Social Work" dalam Adams, Robert, Lena Dominelli dan Malcolm Payne (eds). *Social Work Themes, Issues and Critical Debates*. London: Mac Millan Press Ltd

Santoso, E. (t.t). Revitalisasi dan Eksplorasi Kearifan Lokal (Local Wisdom) dalam Konteks Pembangunan Karakter Bangsa. Artikel Utama, 12-22.

Silalahi, U. (2009). Metode Penelitian Sosial. Bandung: Refika Aditama.

REFERENSI BPS DAN PERATURAN

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2021. Kabupaten Gorontalo Utara Dalam Angka. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. Kecamatan Anggrek Dalam Angka. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

[BPS] Badan Pusat Statistik. 2022. Kecamatan Atinggola Dalam Angka. Jakarta: Badan Pusat Statistik.

Peraturan Menteri Sosial nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 186 Tahun 2014

Keppres RI No.111/1999 tentang Pembinaan Sosial Komunitas Adat Terpencil

Dokumentasi Survey Awal



Dokumentasi Seminar Pendahuluan



Dokumentasi Survey Pengumpulan Data Lapangan



Dokumentasi Survey Pengumpulan Data Lapangan



Dokumentasi Seminar Akhir



Dokumentasi Seminar Akhir

